# WALIKOTA SINGKAWANG

**PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG**

**NOMOR 10 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PENERANGAN JALAN, DAN PAJAK PARKIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SINGKAWANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (4), Pasal 65 ayat (2), Pasal 67 ayat (4), Pasal 73 ayat (3), Pasal 74 ayat (7), Pasal 76 ayat (3), Pasal 77 ayat (3), dan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 23);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PENERANGAN JALAN, DAN PAJAK PARKIR.**

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Dinas adalah dinas yang membidangi pendapatan.
5. Kepala Dinas adalah kepala dinas yang membidangi pendapatan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
11. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
12. Jasa terkait lainnya yang dipungut bayaran pada hotel adalah jasa penunjang/fasilitas kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
13. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
14. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
15. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelengaraan hiburan.

16. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan pungutan bayaran menggunakan tanda masuk, termasuk penyelenggaraan hiburan dalam acara menjelang pergantian tahun baru.
17. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
18. Harga Tanda Masuk, yang selanjutnya disingkat HTM, adalah nilai jual yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.
19. Surat Tanda Terima adalah surat yang harus ditandatangani oleh calon wajib pajak pada saat menerima formulir pendaftaran dan formulir SPtPD dalam proses pendaftaran objek pajak.
20. Tanda Bukti Pembayaran, yang selanjutnya disingkat TBP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak kepada Bendahara Penerimaan Dinas.
21. Slip Setoran adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak kepada Kas Umum Daerah.
22. Surat Tanda Setor, yang selanjutnya disingkat STS adalah surat bukti pembayaran atau penyetoran hasil penerimaan/pungutan pajak dari Bendahara penerimaan Dinas kepada Kas Umum Daerah.
23. Pembayaran adalah jumlah uang yang seharusnya diterima oleh orang pribadi atau badan atas imbalan jasa yang disediakannya, secara tunai, dan/atau dengan cek dan sejenisnya.
24. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan/atau mendengar, menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis, petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
25. Bioskop adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan pemutar film dan fasilitas untuk pertunjukan film serta dapat menyediakan jenis pelayanan makanan dan minuman.
26. Pertunjukan film yang dipasarkan atau *preview film* adalah pertunjukan film yang diselenggarakan di tempat tertentu dengan maksud memperkenalkan film baru atau yang akan dipasarkan oleh pemilik dan/atau importir film kepada pengusaha bioskop, pers dan kalangan terbatas, dengan dipungut bayaran.
27. Diskotik adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan musik rekaman, tata suara, tata lampu, dan fasilitas untuk arena melantai yang dipandu oleh penata lagu atau *disc jockey* serta dilengkapi dengan fasilitas bar.
28. Musik adalah usaha yang menyediakan tempat, alat musik, tata suara, tata lampu, dan fasilitas untuk mengadakan pertunjukan musik secara langsung pada restoran, bar dan sejenisnya.
29. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat, ruangan, peralatan tata suara dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman serta dapat menyediakan makanan dan/atau minuman.

30. Klab malam adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan musik hidup, permainan musik, tata suara, tata lampu, dan fasilitas untuk berdansa, menyediakan jasa pelayanan pramuria, serta pelayanan makanan dan/atau minuman.
31. Panti pijat atau griya pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasiltas pemijatan yang dilakukan oleh tenaga pemijat terlatih dan berpengalaman dalam keahlian pijat relaksasi dan kebugaran.
32. Mandi uap adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas mandi uap dan menyediakan tenaga pemijat.
33. Spa atau *Sante Par Aqua* adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas relaksasi, kebugaran dan kesehatan yang menggunakan terapi air, terapi aroma, terapi musik, dan terapi sejenis lainnya yang dilakukan oleh tenaga terlatih dan berpengalaman.
34. Bola sodok atau *bilyard* adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain bola sodok serta dapat menyediakan jenis pelayanan makanan dan/atau minuman.
35. Bola gelinding atau *bowling* adalah usaha yang menyediakan tempat peralatan, dan fasilitas untuk bermain bola gelinding serta dapat menyediakan jenis pelayanan makanan dan/atau minuman dan fasilitas penjualan dan persewaan peralatan permainan tersebut.
36. Seluncur atau *ice skating* adalah usaha yang menyediakan tempat peralatan, dan fasilitas untuk bermain aneka seluncur serta dapat menyediakan jenis pelayanan makanan dan/atau minuman dan fasilitas penjualan dan persewaan peralatan permainan tersebut.
37. Permainan ketangkasan manual/elektronik adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan, mesin, dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan orang dewasa, serta dapat didukung dengan perkembangan teknologi komputer yang menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras tertentu.
38. Pagelaran kesenian adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan, tata suara, tata lampu, dan fasiltas untuk pertunjukan hiburan seni dan budaya serta dapat menyediakan pelayanan makanan dan/atau minuman.
39. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
40. Tenaga Listrik dari sumber lain adalah tenaga listrik yang dihasilkan dari PT.PLN (Persero).
41. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
42. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
43. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut orang dan barang yang beroda dua atau lebih yang dijalankan dengan tenaga mesin.
44. Penitipan kendaraan bermotor adalah jasa yang menyediakan tempat parkir kendaraan bermotor untuk jangka waktu harian, mingguan atau bulanan.

45. Halaman parkir dan Taman Parkir adalah ruang terbuka yang dikhususkan untuk parkir yang disediakan untuk menunjang kegiatan pada bangunan utama.
46. Gedung Parkir adalah fasilitas berupa bangunan yang diusahakan tersendiri untuk parkir sebagai fasilitas penunjang kegiatan pada bangunan utama.
47. Objek Pajak adalah segala sesuatu yang karena peraturan perundang-undangan dapat dikenai pungutan pajak.
48. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak.
49. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang wajib membayar pajak atau mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
50. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
51. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
52. Sistem Pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terhutang.
53. Sistem *Self Assesment* adalah suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk mendaftar, melapor, menghitung, dan membayar sendiri pajak yang terhutang.
54. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak yang selanjutnya disebut Formulir Pendaftaran adalah formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Dinas.
55. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPtPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.
56. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
59. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

60. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Jabatan, yang selanjutnya disingkat SKPDKB JAB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar yang ditentukan secara jabatan.

61. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.

62. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

63. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPtPDT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

64. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPtPDT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

65. Putusan Banding adalah putusan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

66. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba untuk periode Tahun Pajak tersebut.

67. Bukti Transaksi adalah suatu lembaran bukti tertulis dan/atau tercetak yang digunakan sebagai bukti telah terpenuhinya satu atau lebih jasa pelayanan yang diberikan, dan dapat digunakan sebagai rekening tagihan dan/ atau bukti pembayaran atas jasa pelayanan, yang dapat berupa bon penjualan (*bill bond*), tanda masuk dan karcis parkir.

68. Bon Penjualan atau *Bill Bond* adalah rekening tagihan atau perhitungan keuangan yang harus dibayar oleh tamu atau pengunjung atas penggunaan fasilitas atau jasa yang diberikan.

69. Porporasi adalah tanda pengesahan dari Dinas atas benda berharga dan benda lainnya yang akan dipergunakan sebagai bukti transaksi atas pelayanan yang diberikan oleh wajib pajak.

70. Omset adalah penerimaan bruto sebelum dikurangi biaya-biaya termasuk diskon.

71. Uang yang seharusnya dibayar atau uang yang seharusnya diterima adalah jumlah uang pembayaran atau penerimaan atas harga pelayanan/ penjualan/ pembelian barang dan jasa sebelum dipotong diskon termasuk kenaikan harga serta pajak yang dikenakan.

72. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor dalam bentuk kartu yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan daerah dan tanda pengenal diri atau identitas dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

73. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

## BAB II

## RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu

### Jenis Pajak

### Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur tentang pemungutan pajak yang meliputi :

a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Penerangan Jalan; dan
e. Pajak Parkir.

### Bagian Kedua

### Objek Pajak

### Pasal 3

(1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk fasilitas/jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

(2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

(3) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

(4) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

(5) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

**Pasal 4**

(1) Pelayanan/Penjualan fasilitas hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada tamu hotel yang menginap dan/atau kepada pengunjung dan masyarakat umum yang tidak menginap seperti pelayanan restoran, jasa boga/katering, cafe dan sejenisnya, karaoke, diskotik, pub, bar, pusat kebugaran (*fitness centre*), salon kecantikan, spa/*massage*, mandi uap dan sejenisnya, kolam renang, golf, tenis, billyard, bowling, ice sktating, permainan ketangkasan manual/elektronik termasuk ruang serba guna untuk pertemuan rapat/resepsi, wajib didaftarkan oleh Wajib Pajak Hotel kepada Dinas untuk dikukuhkan sebagai Wajib Pajak yang terpisah dari Pajak Hotel.

(2) Pelayanan/ penjualan fasilitas hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak sesuai ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku, yakni :

a. ruang serba guna untuk pertemuan/rapat/resepsi dikenakan pungutan Pajak Hotel ;

b. pelayanan restoran, jasa boga/katering, cafe dan sejenisnya, dikenakan pungutan Pajak Restoran;

c. pelayanan hiburan berupa musik hidup, karaoke, diskotik, pub, bar, klab malam, ruang musik (*music room*), balai gita (*singing hall*), ruang salesa music *(music lounge)*, pusat kebugaran (*fitness centre*), salon kecantikan, spa/*massage*, mandi uap dan sejenisnya, kolam renang, golf, tenis, billyard, bowling, ice skating, ketangkasan manual/elektronik dan kegiatan hiburan lainnya yang menyatu pada pelayanan hotel dikenakan pungutan Pajak Hiburan; dan

d. fasilitas parkir, dikenakan pungutan Pajak Parkir.

(3) Jenis hiburan yang menjadi Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat berupa :

a. jenis pelayanan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang menyatu pada pelayanan hotel dan restoran, yang tagihan atas pelayanannya dengan menggunakan *bill bond*; dan

b. jenis pelayanan hiburan tertentu baik yang dilaksanakan di dalam maupun di luar gedung hotel dan restoran dengan menggunakan tanda masuk.

(4) Jenis hiburan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa :

a. pagelaran kesenian rakyat / tradisional;

b. pameran, pertunjukan sirkus, akrobat, sulap, wahana wisata air (*waterpark*), seluncur (*ice skating*), komedi putar, pasar malam, dan pertandingan olahraga;

c. tontonan film;

d. pertunjukan pagelaran kesenian musik/band, artis, tarian; dan

e. pacuan kuda, dan pacuan kendaraan bermotor.

**Bagian Ketiga**

**Subjek Pajak**

**Pasal 5**

(1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

(2) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran.

(3) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.

(4) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.

(5) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.

**Bagian Keempat**

**Wajib Pajak**

**Pasal 6**

(1) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

(2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

(3) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan/menyelenggarakan Hiburan.

(4) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan dan/ atau menyediakan dan/atau menggunakan tenaga listrik.

(5) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.

**BAB III**

**KEWENANGAN**

**Pasal 7**

(1) Pelaksanaan pemungutan jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah kewenangan Walikota.

(2) Kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. menerbitkan NPWPD, Surat Keputusan Pengukuhan Wajib Pajak, Surat Keputusan Penunjukan Wajib Pungut;

b. menerbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,SKPDLB, SKPDN, STPD;

c. menerbitkan Surat Persetujuan Pengangsuran dan Penundaan Pajak;

d. menerbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita;

e. melakukan Pemeriksaan, Penagihan dan Pengawasan Pemungutan Pajak;

f. melakukan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan dan Keringanan Ketetapan Pajak, serta Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi;

g. menunjuk Konsultan Pajak atau Auditor dalam mendampingi Petugas Pemeriksa Pajak.

h. memberikan Penghapusan Piutang Pajak yang kadaluwarsa;

i. memberikan Pembebasan Pajak dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/ atau sanksinya;

j. menerbitkan Surat Keputusan Keberatan Pajak;

k. menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Keberatan Pajak; dan

l. melakukan permintaan Transfer Bagian Pajak yang menjadi Hak Daerah.

(3) Kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dilimpahkan kepada Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Penghapusan Piutang Pajak yang kadaluwarsa, pembebasan pajak dalam hal-hal tertentu dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, dan huruf i diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

## BAB IV

## PENDAFTARAN DAN PELAPORAN

### Bagian Kesatu

### Pendaftaran

### Pasal 8

(1) Pendataan jenis Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pendataan terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan secara *self assesment.*

(2) Berdasarkan pendataan secara *self assesment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri sendiri sesuai dengan objek pajak yang dimiliki dengan menggunakan Formulir Pendaftaran kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan usaha dimulai dan/atau sebelum pengusahaan/penyediaan/penggunaan tenaga listrik.

(3) Dikecualikan dari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah usaha penyelenggaraan hiburan tertentu yang wajib mendaftar dan melaporkan rencana kegiatannya paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum usaha dimulai.

(4) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh Dinas serta diambil sendiri dan wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan melampirkan :

a. fotocopy identitas diri/penanggung jawab/penerima kuasa (KTP, SIM, dan paspor);

b. fotocopy Surat Izin usaha yang dimiliki;

c. dikecualikan dari sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah Wajib Pajak hiburan tertentu, yakni harus melampirkan lembar asli Surat Izin Usaha yang dimiliki; dan

d. surat kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP/ SIM/ paspor, dari pemberi kuasa.

(5) Formulir Pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kembali kepada dinas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterima.

(6) Formulir Pendaftaran yang disampaikan Wajib Pajak kepada Dinas dan telah dinyatakan benar serta lengkap lampirannya wajib diberi tanggal terima, selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak.

(7) Dalam hal Wajib Pajak telah mendaftarkan usahanya sebagai objek pajak dan dinyatakan benar serta lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja Dinas wajib menerbitkan :

a. Surat Keputusan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak dan Surat Keputusan Penunjukan sebagai Wajib Pungut dengan sistem pemungutan pajak yang dikenakan; dan

b. Kartu NPWPD.

(8) Bentuk dan isi Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(9) Daftar Induk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(10) Surat Keputusan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak, Surat Keputusan Penunjukan sebagai Wajib Pungut, dan Kartu NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran III, sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Pasal 9**

(1) Penyelenggaraan hiburan tertentu dan penyelenggaraan parkir yang telah mendapat izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib mendaftar dan mengurus pajak dengan memberikan informasi yang benar kepada Dinas.

(2) Informasi yang benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup tentang :

a. Informasi penyelenggaraan hiburan tertentu yang terdiri dari :

1. besarnya bayaran atau harga tanda masuk untuk tiap-tiap kelas tempat penyelenggaraan hiburan;
2. jumlah tanda masuk yang akan dijual kepada pengunjung/penonton; dan
3. keterangan lain yang diperlukan guna penetapan besarnya pajak hiburan.

b. Informasi penyelenggaraan parkir yang terdiri dari :
1. besarnya tarif parkir yang dikenakan untuk setiap jenis kendaraan;
2. jumlah karcis parkir yang terjual;
3. jumlah kendaraan yang parkir, baik parkir menginap maupun parkir biasa; dan
4. keterangan lain yang diperlukan guna penetapan besarnya pajak parkir.

(3) Dalam hal penyelenggaraan hiburan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftar dan mengurus pajak, pembayaran pajak hiburan ditagih seketika dan sekaligus ditempat penyelenggaraan hiburan oleh petugas Dinas yang dilengkapi dengan Surat Tugas Pemeriksaan, Pengawasan dan Penagihan.

**Bagian Kedua**

**Pelaporan**

**Paragraf 1**

**Tata Cara Pelaporan**

**Pasal 10**

(1) Pajak terutang dilaporkan sendiri oleh wajib pajak dengan menggunakan SPtPD yang tersedia dan diambil sendiri pada Dinas.

(2) SPtPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak serta disampaikan kembali kepada Dinas.

(3) Penyampaian SPtPD pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir wajib melampirkan dokumen rekapitulasi omset penerimaan bulan yang bersangkutan.

(4) SPtPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Daftar SPtPD dan Daftar SPtPD *Self Assesment* oleh Dinas.

(5) SPtPD yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang selanjutnya dicatat ke dalam Kartu Data merupakan pelaporan omset usaha sebagai penerimaan bruto Wajib Pajak, yang terdiri atas :

a. rekapitulasi penyediaan pelayanan hotel dengan dipungut bayaran termasuk persewaan ruangan dan jasa penunjang/fasilitas lainnya sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan;

b. penerimaan atas penjualan yang disediakan restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, *coffee shop*, pujasera, pusat jajan (*food court*) dan yang sejenisnya, termasuk pelayanan pesanan (*delivery order*) tidak dimakan ditempat (*take away*), dan jasa boga/katering dengan pembayaran;

c. penerimaan atas penyerahan jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran;

d. rencana penerimaan berdasarkan harga dan jumlah tanda masuk yang akan dijual dan/atau diporporasi untuk hiburan tertentu; dan

e. penerimaan atas penyediaan pelayanan parkir dengan dipungut bayaran termasuk persewaan lahan parkir dan jasa penunjang lainnya sebagai kelengkapan fasilitas parkir yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.

(6) Pajak penerangan jalan atas penggunaan listrik dari sumber lain atau yang dihasilkan oleh PT. PLN (Persero) wajib menyampaikan SPtPD berupa data jumlah pelanggan, jumlah pembayaran Penjualan Tenaga Listrik (PTL) dan jumlah rupiah Pajak Penerangan Jalan.

(7) Penyampaian SPtPD Pajak Penerangan Jalan dari listrik yang dihasilkan sendiri wajib melampirkan dokumen daya terpasang (DT), Kemampuan daya terpasang (KDT), Koefisien tenaga listrik yang terpakai (KTL), Harga Satuan Listrik (HSL),dan Jam Nyala (JN).

(8) Bentuk dan isi SPtPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daftar SPtPD dan Daftar SPtPD *Self Assesment* sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan Kartu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran VI sampai dengan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Paragraf 2**

**Masa Pelaporan dan Teguran**

**Pasal 11**

(1) Penyampaian SPtPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.

(2) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan SPtPD, dilakukan peringatan melalui Surat Teguran Penyampaian SPtPD sebanyak 3 (tiga) kali dengan frekuensi setiap 7 (tujuh) hari dan dicatat kedalam Daftar Surat Teguran Penyampaian SPtPD.

(3) Dikecualikan dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyelenggaraan hiburan tertentu, yang wajib menyampaikan SPtPD nya paling lama 1 (satu) hari setelah hiburan diselenggarakan.

(4) Daftar Surat Teguran Penyampaian SPtPD dan Surat Teguran Penyampaian SPtPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB V

## BUKTI TRANSAKSI

### Pasal 12

(1) Wajib Pajak dalam mencatat transaksi atau penerimaan pembayaran atas pelayanan yang diberikan wajib menggunakan bukti transaksi dan/atau catatan pembukuan dan/atau catatan lainnya.

(2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. *bill bond* untuk pelayanan hotel, restoran, dan hiburan yang menyatu pada pelayanan hotel bagi konsumen yang menginap maupun pelayanan restoran dan hiburan hotel bagi tamu/masyarakat umum yang tidak menginap;

b. tanda masuk untuk pelayanan jenis hiburan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b yang dilaksanakan di dalam maupun di luar gedung hotel dan restoran serta bukan merupakan paket pelayanan hotel dan restoran; dan

c. karcis parkir untuk pelayanan parkir.

(3) *Bill bond* yang digunakan oleh wajib pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah terhadap pelayanan diskotik, musik hidup, karaoke, klab malam, ruang musik (*music room*), balai gita (*singing hall*), pub, ruang salesa music *(music lounge)*, dan kegiatan hiburan lainnya yang menyatu pada pelayanan hotel dan restoran.

(4) Catatan pembukuan dan/atau catatan lainnya digunakan sebagai dokumen penerimaan dalam menentukan omset jasa pelayanan/penyedia makanan dan/atau minuman pada rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering yang sederhana dan belum menggunakan *bill bond* serta atas penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri.

(5) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicetak dan disediakan oleh Dinas, atau oleh Wajib Pajak setelah dikoordinasikan dengan Dinas, serta wajib diporporasi oleh Dinas berdasarkan permohonan dari wajib pajak.

(6) Bentuk surat permohonan porporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 13

(1) Dinas, Kas Umum Daerah pada Bank yang ditunjuk, dan petugas pemungut pajak dalam melakukan pelayanan dan/atau administrasi Pajak Daerah wajib memberikan Bukti Pembayaran dan/atau slip setoran.

(2) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan TBP sebagai bukti pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak kepada Petugas Pemungut Pajak dan Bendahara Penerimaan Dinas.

(3) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan slip setoran sebagai bukti pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak kepada Kas Umum Daerah pada Bank yang ditunjuk.

(4) Bukti penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan STS sebagai bukti penyetoran pungutan pajak dari Bendahara Penerimaan Dinas kepada Kas Umum Daerah pada Bank yang ditunjuk.

(5) Hasil pemungutan pajak oleh petugas pemungut disetorkan kepada Bendahara Penerimaan Dinas dengan melampirkan SPtPD dan TBP pajak yang dipungut.

(6) Bentuk dan isi TBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan STS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada Lampiran XII dan Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Pasal 14**

Penggunaan bukti transaksi oleh Wajib Pajak dalam memberikan jasa pelayanan, serta penggunaan bukti pembayaran dan bukti setoran dalam pelayanan pajak diatur sebagai berikut :

a. Bill bond dicetak sekurang-kurangnya rangkap 3 (tiga) dengan warna berbeda, dan harus memuat :
   1. catatan tentang biaya pemakaian fasilitas dan fasilitas penunjang lainnya;
   2. catatan penyerahan pesanan makanan dan/atau minuman termasuk juga tambahannya;
   3. nomor urut dan seri;
   4. nama dan alamat usaha;
   5. macam, jenis kuantum, harga satuan per item (jenis) dan jumlah harga jual; dan
   6. jumlah pajak yang harus dipungut.

b. Karcis parkir dan tanda masuk yang dicetak harus memuat :
   1. nomor urut dan seri;
   2. besaran biaya/tarif; dan
   3. dasar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

c. TBP yang dicetak harus memuat :
   1. nomor bukti TBP ;
   2. bendahara Penerima Unit Kerja ;
   3. besaran jumlah uang yang diterima serta dinyatakan dengan hurup ;
   4. nama dan alamat penyetor atau wajib pajak serta peruntukannya ;
   5. rincian kode rekening, uraian jenis pajak dan jumlah setoran;
   6. tanggal terima uang ; dan
   7. tanda tangan bendahara penerima dan pembayar / penyetor.

d. STS pajak yang dicetak harus memuat :
   1. nomor STS ;
   2. nama Bank dan nomor rekening ;

3. jumlah setoran dan rincian sesuai nomor rekening sera tanggl terima uang ; dan

4. tanda tangan pengguna anggaran dan bendahara penerima.

e. Nomor urut dan seri bukti transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3 dan dalam huruf b angka 1 harus menggunakan angka dari yang terkecil secara berurutan untuk penomoran dan huruf alphabet secara berurutan untuk penyerian;

f. Bukti transaksi harus diserahkan kepada Subjek Pajak/konsumen pada saat Wajib Pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar; dan

g. Bukti transaksi berupa *bill bond* yang telah dibayar oleh Subjek Pajak/ konsumen sesuai peruntukanya wajib diserahkan kepada :

1. lembar kesatu, untuk subjek pajak atau konsumen;

2. lembar kedua, untuk Dinas; dan

3. lembar ketiga, untuk wajib pajak yang bersangkutan.

**Pasal 15**

(1) Untuk menampung perkembangan teknologi perekaman data transaksi usaha, Wajib Pajak dapat menggunakan peralatan komputer atau mesin *cash register* sebagai bukti transaksi dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas untuk dikecualikan/dibebaskan dari kewajiban porporasi bukti transaksi.

(2) Dinas dapat menyetujui atau menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara tertulis berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain tingkat peredaran usaha dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, intensitas pelayanan dan transaksi usaha, serta kapasitas dan kemampuan teknis peralatan komputer atau mesin *cash register* yang dimiliki.

(3) Dalam hal Dinas menyetujui permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Wajib Pajak wajib :

a. menghubungkan perangkat komputer atau mesin *cash register* yang digunakannya dengan sistem pengawasan perpajakan dalam jaringan sistem informasi Dinas secara *online* apabila diperlukan; dan

b. melaporkan hasil transaksi penerimaan atas penggunaan komputer atau mesin *cash register* secara berkala dengan melampirkan *print out* hasil transaksi pada waktu menyampaikan SPtPD kepada Dinas.

**Pasal 16**

Bukti transaksi, baik yang tertulis atau dicetak menggunakan komputer maupun mesin *cash register* sebagai bukti transaksi penerimaan/pembayaran harus mencantumkan tarif pajak.

**Pasal 17**

(1) Tanda masuk untuk penyelenggaraan hiburan tertentu dapat berbentuk buku dengan isi 100 (seratus) lembar atau 50 (lima puluh) lembar per buku, serta lembaran lepas atau undangan sesuai dengan permohonan penyelenggara.

(2) Terhadap penyelenggaraan hiburan film di bioskop yang dibolehkan menggunakan mesin *cash register* untuk mencetak tanda masuk sesuai persetujuan tertulis dari Dinas, tanda masuk dapat berupa kertas gulungan (roll) yang berisi 500 (lima ratus) tanda masuk per rol.

**Pasal 18**

(1) Setiap Wajib Pajak yang menyelenggarakan hiburan dengan menggunakan bukti transaksi berupa tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b berkewajiban :

a. memasang pengumuman yang memuat daftar harga tanda masuk untuk setiap kelas di tempat pembayaran tanda masuk;

b. menjual tanda masuk yang telah diporporasi;

c. menyobek setiap tanda masuk yang dipergunakan pada saat penonton atau pengunjung memasuki tempat hiburan;

d. menyimpan bagian tanda masuk sebagai bukti pengawasan selama 14 (empat belas) hari setelah tanda masuk tersebut digunakan; dan

e. melaporkan jumlah penjualan tanda masuk kepada Dinas.

(2) Setiap Wajib Pajak yang menyelenggarakan hiburan dengan menggunakan tanda masuk, dilarang :

a. mengadakan, menyediakan, memberi, menjual dan menyebarkan :

   1. tanda masuk yang tidak mencantumkan harga; dan

   2. tanda masuk yang tidak diporporasi.

b. memberikan tempat atau kelas kepada penonton atau pengunjung selain dari tempat atau kelas yang tercantum pada tanda masuk;

c. mengubah tanda masuk yang telah diporporasi tanpa persetujuan Dinas;

d. memberikan atau menjual kembali tanda masuk yang telah dipakai kepada penonton atau pengunjung lain; dan

e. memungut atau menerima pembayaran tanda masuk melebihi harga yang tercantum pada tanda masuk.

## BAB VI

## DASAR PENGENAAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

### Bagian Kesatu

### Pajak Hotel

### Pasal 19

(1) Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah yang seharusnya dibayar kepada hotel.

(2) Jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan *bill bond* yang dikeluarkan oleh wajib pajak atas jumlah yang seharusnya dibayar oleh pengunjung/tamu hotel.

(3) Pajak Hotel terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif Pajak Hotel.

(4) Contoh penghitungan Pajak Hotel sebagai berikut :

- Sewa kamar 2 hari @ Rp. 450.000,- = Rp. 900.000,-
- Loundry 2 potong @ Rp. 50.000,- = Rp. 100.000,-
- Telephone ..... = Rp. 100.000,-
- Taxi ..... = Rp. 150.000,-

Service 15 % ..... = Rp. 187.500,-

Jumlah sebelum pajak..... ...= Rp. **1.437.500,-**

Potongan harga / discount 5 % ..... ..= Rp. 71.875,-

Jumlah setelah discount..... ....= Rp. 1.365.625,-

**Pajak Hotel** = 8 % x Rp. 1.437.500,- ..= Rp. **115.000,-**

***Jumlah bill bond hotel yang harus dibayar..... = Rp. 1.480.625,-***

- Restoran ..... = Rp. 1.000.000,-
- Makan/minum di cafe ..... = Rp. 250.000,-

Jumlah ..... = Rp. 1.250.000,-

**Pajak restoran** 8 % x Rp.1.250.000,-..= Rp. 100.000,-

***Jumlah bill bond restoran yang harus dibayar.....= Rp.1.350.000,-***

- Karaoke ..... = Rp. 400.000,-

**Pajak hiburan** = 25% x Rp.400.000,- .= Rp. 100.000,-

***Jumlah bill bond Hiburan/karaoke yang harus dibayar= Rp. 500.000,-***

(5) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan oleh Wajib Pajak/Pengelola Hotel dengan *bill bond* yang terpisah sesuai objek pajak/pelayanan yang dinikmati oleh subjek pajak.

**Bagian Kedua**

**Pajak Restoran**

**Pasal 20**

(1) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang seharusnya diterima restoran.

(2) Jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan *bill bond* yang harus dibayar orang atau badan atas jasa yang diberikan oleh restoran.

(3) Pajak Restoran terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif Pajak Restoran.

(4) Contoh penghitungan pajak restoran sebagai berikut :

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| • Nasi Putih | 5 @ Rp. 3.000,00 | ..... | = | Rp. 15.000,00 |
| • Ayam Bakar | 5 @ Rp. 8.000,00 | ..... | = | Rp. 40.000,00 |
| • Ayam Goreng | 5 @ Rp. 8.000,00 | ..... | = | Rp. 40.000,00 |
| • Sop Daging | 5 @ Rp.15.000,00 | ..... | = | Rp. 75.000,00 |
| • Lalapan | 5 @ Rp. 4.000,00 | ..... | = | Rp. 20.000,00 |
| • Es Teh | 5 @ Rp. 3.000,00 | ..... | = | Rp. 15.000,00 |
| Jumlah | | ..... | = | Rp.205.000,00 |
| ***Pajak Restoran*** *( 8 % x Rp. 205.000,00 )* | | ..... | = | Rp. *16.400,00* |
| ***Bill Bond restoran yang harus dibayar*** | | ..... | = | **Rp. 221.400,-** |
| •Karaoke di restoran | | ..... | = | Rp.100.000,- |
| •Spa/massage/pijat di restoran | | ..... | = | Rp.100.000,- |
| Jumlah | | ..... | = | Rp.200.000,- |
| **Pajak Hiburan** 25% x Rp.200.000,- | | ..... | = | Rp. 50.000,- |
| ***Bill bond* hiburan di restoran yang harus dibayar** | | ..... | = | **Rp.250.000,-** |

(5) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan oleh Wajib Pajak/ Pengelola Restoran dengan *bill bond* yang terpisah sesuai objek pajak/ pelayanan yang dinikmati oleh subjek pajak.

**Bagian Ketiga**

**Pajak Hiburan**

**Pasal 21**

(1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.

(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah omset yang dihitung berdasarkan jumlah tanda masuk yang terjual atau berdasarkan omset sesuai *bill bond.*

(3) Pajak hiburan terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak hiburan sesuai jenisnya.

(4) Contoh perhitungan Pajak Hiburan jenis Pasar Seni dan Pameran sebagai berikut :

- Harga tanda masuk Rp. 25.000,- per orang.
- Jumlah tanda masuk yang terjual 1.000 lembar.
- Omset = Rp.25.000,- x 1.000 lembar = Rp. 25.000.000,-
- **Pajak Hiburan terutang Rp. 25.000.000,- x 10 % = <u>Rp. 2.500.000,-</u>**

(5) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan oleh wajib pajak berdasarkan omset sesuai jenis hiburan dan tarif pajaknya.

**Bagian Keempat**

**Pajak Penerangan Jalan**

**Pasal 22**

(1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.

(2) Nilai Jual Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain, ditetapkan berdasarkan :

a. Jumlah tagihan biaya beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian KWh / variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik; atau

b. Jumlah atau besarnya pembelian listrik pra bayar.

(3) Nilai jual tenaga listrik dari listrik yang dihasilkan sendiri dihitung dengan memperhatikan :

a. Kapasitas unit pembangkit listrik / Daya Terpasang (DT);

b. Koefisien kemampuan Daya Terpasang unit pembangkit (KDT);

c. Koefisien Tenaga Listrik yang terpakai untuk usaha (KTL);

d. Harga Satuan Listrik (HSL); dan

e. Jam Nyala/operasi unit pembangkit dalam 1 (satu) bulan (JN).

(4) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf e ditetapkan sebagai berikut :

a. KDT = 0,75;

b. KTL = 0,75; dan

c. JN = rata-rata 200 (dua ratus) jam/bulan.

(5) JN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat ditentukan lebih besar berdasarkan hasil pantauan riil dilapangan oleh petugas atau dapat lebih kecil jika bukti-bukti yang jelas dan sah dapat ditunjukkan oleh Wajib Pajak.

(6) Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak penerangan jalan.

(7) Perhitungan pajak terutang atas penggunaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu **Nilai Jual Tenaga Listrik x Tarif PPJ.**

(8) Perhitungan pajak terutang atas penggunaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu **(DT x KDT x KTL x HSL x JN) x Tarif PPJ.**

**Bagian Kelima**

**Pajak Parkir**

**Pasal 23**

(1) Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

(2) Jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah karcis terjual dikali harga karcis.

(3) Pajak Parkir terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak parkir.

(4) Contoh perhitungan pajak parkir sebagai berikut :

- Harga Karcis Parkir kendaraan roda 4 @ Rp. 2.000,-
- Jumlah karcis parkir kendaraan roda 4 terjual sebulan 100 lembar
- Omset 1 (satu) bulan Rp. 200.000,-
- **Pajak Parkir terutang 20 % x Rp. 200.000,- = Rp. 40.000,-**

**BAB VII**

**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Bagian Kesatu**

**Tempat Pembayaran dan Tata Cara Pembayaran Pajak**

**Pasal 24**

(1) Pajak terutang dapat dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SPtPD kepada :

a. Kas Umum Daerah melalui Bank Pemerintah yang ditunjuk; dan

b. Bendahara Penerimaan Dinas.

(2) Pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 28 bulan berikutnya.

(3) Pajak terutang yang diterima langsung oleh Bendahara Penerimaan Dinas dari Wajib Pajak maupun dari Petugas Pemungut, wajib disetorkan ke Kas Umum Daerah oleh Bendahara Penerimaan Dinas selambat-lambatnya 1 x 24 jam dengan menggunakan STS.

(4) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

(5) Penyetoran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas ke Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.

(6) Terhadap usaha yang dilakukan atas nama atau tanggungan beberapa orang atau badan, atau lebih dari 1 (satu) orang atau beberapa badan, maka orang atau badan, masing-masing anggota atau masing-masing pengurus badan dianggap sebagai Wajib Pajak, dan bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajaknya.

(7) Pemilik/pengelola hotel bertanggung jawab terhadap pembayaran Pajak Hotel, dan pajak lainnya yang terutang sesuai Objek Pajak yang dikelola.

(8) Pemilik/ pengelola restoran bertanggung jawab terhadap pembayaran Pajak Restoran, dan pajak lainnya yang terutang sesuai Objek Pajak yang dikelola.

(9) Pengelola/ pemilik/ penyelenggara tempat usaha selain hotel dan restoran bertanggung jawab terhadap Pajak Hiburan atas hiburan yang diselenggarakan termasuk pajak lainnya sesuai Objek Pajak yang dikelola.

(10) Pembayaran Pajak dapat dilakukan Wajib Pajak dalam bentuk tunai, cek dan sejenisnya.

**Pasal 25**

(1) Setiap penyelenggara hiburan tertentu yang menggunakan tanda masuk wajib membayar uang jaminan Pajak Hiburan dengan pembayaran di muka sebelum tanda masuk diporporasi oleh Dinas.

(2) Besarnya pembayaran uang jaminan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak sesuai tanda masuk yang diporporasi, dan dititipkan sementara pada Bendahara Penerimaan Dinas.

(3) Jangka waktu penitipan uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan waktu penyelenggaraan hiburan yang bersangkutan.

(4) Untuk pembuktian atas pembayaran uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Penerimaan Dinas wajib mengeluarkan tanda terima sementara uang jaminan pembayaran pajak hiburan.

(5) Tata cara penyerahan pembayaran Pajak Hiburan tertentu diatur sebagai berikut:

a. Bidang Pendapatan melaporkan hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan hiburan kepada Kepala Dinas selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah hiburan diselenggarakan;

b. sesuai laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan laporan SPtPD dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Bidang Pendapatan meneliti dan menghitung besarnya pajak terutang;

c. hasil penghitungan pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dituangkan ke dalam TBP untuk ditandatangani dan dibayar oleh Wajib Pajak atau kuasanya;

d. pajak terutang yang dibayar sesuai TBP sebagaimana dimaksud dalam huruf c, wajib disetorkan ke Kas Umum Daerah oleh Bidang Pendapatan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam melalui Bendahara Penerimaan Dinas, yang dikeluarkan dari uang jaminan pembayaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

e. dalam hal terdapat kelebihan uang jaminan pembayaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pendapatan mengembalikannya kepada Wajib Pajak dengan menggunakan tanda terima pengembalian; dan

f. dalam hal jumlah pajak yang harus dibayar lebih besar dari jumlah uang jaminan yang ada, kekurangannya wajib dilunasi sekaligus secara tunai oleh Wajib Pajak.

(6) Dalam hal penyelenggaraan hiburan tertentu dilaksanakan lebih dari satu hari, tanda masuk yang diporporasi dan uang jaminan yang dititipkan lebih dari satu kali, maka Petugas Bidang Pendapatan yang ditunjuk untuk menerima titipan uang jaminan wajib melaporkan penerimaan uang jaminan tersebut secara periodik kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pendapatan.

**Pasal 26**

Petugas Pemeriksa, Pengawas dan Penagih yang menerima pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), wajib menggunakan tanda terima serta melaporkan dan menyerahkan pajak hiburan yang diterimanya kepada Bendahara Penerimaan Dinas dan diketahui oleh Kepala Bidang Pendapatan dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pajak hiburan diterima.

**Bagian Kedua**

**Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak**

**Pasal 27**

(1) Dinas atas nama Walikota dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak terutang dalam SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDKB JAB/ STPD atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

(2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :

a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota u.p. Kepala Dinas disertai dengan alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SKPDKB/SKPDKBT/ SKPDLB/SKPDKB JAB/STPD yang dimohon;

b. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus sudah diterima oleh Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditentukan dengan melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan tersebut;

c. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dicatat dalam Buku Register Permohonan Angsuran dan Buku Register Penundaan Pembayaran;

d. jika permohonan disetujui, maka dibuat Surat Perjanjian Angsuran dan Daftar Surat Perjanjian Angsuran serta Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran dan Daftar Persetujuan Penundaan Pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Wajib Pajak;

e. jika permohonan ditolak, maka dibuat Surat Pemberitahuan Penolakan Angsuran serta Surat Pemberitahuan Penolakan Penundaan Pembayaran;

f. Dalam hal Wajib Pajak telah mengajukan permohonan Pembayaran Angsuran atau Penundaan Pembayaran dengan melampirkan dokumen dan alasannya, Dinas wajib menyerahkan Surat Perjanjian Angsuran atau Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran, atau Surat Pemberitahuan Penolakan Angsuran atau Surat Pemberitahuan Penolakan Penundaan Pembayaran kepada Wajib Pajak paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;

g. copy Surat Perjanjian Angsuran dan Daftar Surat Perjanjian Angsuran atau Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran dan Daftar Persetujuan Penundaan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf d disampaikan kepada Seksi Pembukuan dan Pengendalian, dan Seksi Penagihan;

h. copy Surat Pemberitahuan Penolakan Angsuran atau Surat Pemberitahuan Penolakan Penundaan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf e disampaikan kepada Seksi Pembukuan dan Pengendalian, dan Seksi Penagihan;

i. pembayaran secara angsuran diberikan paling lama 2 (dua) kali angsuran dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal Surat Perjanjian, kecuali ditetapkan lain oleh Dinas berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;

j. pembayaran secara angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;

k. penundaan pembayaran diberikan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB / SKPDKBT/ SKPDLB/ SKPDKB JAB/STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;

l. terhadap jumlah angsuran yang telah disetujui sesuai Surat Perjanjian Angsuran, harus dibayar setiap bulan dan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi; dan

m. Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran angsuran untuk SKP yang sama.

(3) Bentuk dan isi Surat Permohonan Angsuran, Surat Permohonan Penundaan Pembayaran, Buku Register Permohonan Angsuran, Buku Register Permohonan Penundaan Pembayaran, Surat Perjanjian Angsuran, Daftar Surat Perjanjian Angsuran, Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran, Daftar Persetujuan Penundaan Pembayaran, Surat Pemberitahuan Penolakan Angsuran, Surat Pemberitahuan Penolakan Penundaan Pembayaran, tercantum dalam Lampiran XIV sampai dengan Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

**Pasal 28**

Terhadap pembayaran angsuran pajak dikenakan denda berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dengan ketentuan bahwa :

a. jumlah sisa angsuran adalah pajak terutang dikurangi pokok pajak yang telah diangsur;

b. pokok pajak angsuran perbulan adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang dengan jumlah bulan angsuran; dan

c. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen) dari seluruh jumlah sisa angsuran.

**Pasal 29**

Terhadap penundaan pembayaran pajak dikenakan denda berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dengan ketentuan bahwa :

a. jumlah bunga penundaan terhadap jumlah pajak terutang yang akan ditunda adalah 2% (dua persen) dikali jumlah bulan penundaan dan dikali dengan seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda ;

b. besarnya pajak terutang yang harus dibayar karena penundaan adalah seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda ditambah dengan jumlah bunga penundaan; dan

c. pajak terutang yang ditunda harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo atau pada tanggal dan bulan batas akhir penundaan yang telah ditentukan, dan tidak lagi dapat diangsur.

**Bagian Ketiga**

**Penagihan**

**Pasal 30**

(1) Untuk menagih pajak terutang Dinas dapat menerbitkan STPD.

(2) Bentuk dan isi STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Pasal 31**

(1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.

(2) Tahapan dan urutan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, adalah sebagai berikut :

a. dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding, Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Teguran serta menyampaikannya kepada Wajib Pajak;

b. Kepala Dinas selaku Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa melalui Juru Sita Pajak menyampaikan Surat Paksa tersebut kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dalam waktu paling singkat 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran diterima Wajib Pajak dengan membuat Laporan Pelaksanaan Surat Paksa;

c. Kepala Dinas selaku Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, melalui Juru Sita Pajak melaksanakan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak dalam waktu paling singkat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah pelaksanaan/pemberitahuan Surat Paksa dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyitaan;

d. Kepala Dinas selaku Pejabat yang menerbitkan Surat Pencabutan Sita melalui Juru Sita Pajak menyampaikan surat tersebut kepada Wajib Pajak, apabila :

1. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak; dan
2. berdasarkan pencabutan sita dari putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak.

e. Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari kerja setelah pelaksanaan penyitaan mengumumkan penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak yang telah disita melalui media massa;

f. Kepala Dinas selaku Pejabat, melaksanakan penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak bertempat di Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang;

g. Lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak lelang dibatalkan, atau objek lelang musnah; dan

h. Kepala Dinas menerbitkan Surat kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak melalui Juru Sita Pajak untuk disampaikan kepada Wajib Pajak di antara waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e sampai dengan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f.

(3) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.

(4) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa, tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak dan mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

(5) Bentuk dan isi Daftar Surat Teguran, Surat Teguran, Surat Paksa, Laporan Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Berita Acara Pelaksanaan Sita, Surat Pencabutan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXV sampai dengan Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Pasal 32**

Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), apabila :

a. Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;

b. Wajib Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;

c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaannya yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;

d. Badan Usaha akan dibubarkan oleh Pemerintah Daerah; dan

e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

## BAB VIII

## PEMBUKUAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu

### Pembukuan

### Pasal 33

(1) Wajib Pajak dengan peredaran usaha atau omset lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia atau prinsip pembukuan yang berlaku secara umum.

(2) Wajib Pajak dengan peredaran usaha atau omset sampai dengan Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, dapat dibebaskan dari kewajiban pembukuan, dengan persyaratan tetap diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha berupa pendapatan bruto secara teratur, yang menjadi dasar untuk penghitungan pajak.

(3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.

(4) Pembukuan dan pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dari Pajak Penerangan Jalan yang dihasilkan oleh sumber lain.

### Pasal 34

Tata cara Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan atas setiap transaksi penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) adalah sebagai berikut :

a. pencatatan tentang pendapatan bruto usahanya harus secara lengkap dan benar;

b. pencatatan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;

c. apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) unit usaha, maka pencatatan masing-masing usaha harus dilakukan secara terpisah; dan

d. pencatatan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak atau dokumen lainnya.

**Bagian Kedua**

**Pemeriksaan**

**Pasal 35**

(1) Dalam rangka pemeriksaan Pajak Daerah, petugas pemeriksa yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

(2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

(3) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib membantu Petugas Pemeriksa dalam hal :

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasar dokumen lain yang berhubungan dengan pajak terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;

c. memberi kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan kas *(kas opname)*, *stock bon* penjualan atau *bill* maupun mesin *cash register* yang ada pada penyelenggara; dan

d. memberikan data potensi dan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas.

(4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Kepala Dinas dengan persetujuan Walikota dapat menunjuk Konsultan Pajak atau Auditor untuk mendampingi petugas Pemeriksa Pajak.

(5) Untuk kepentingan pengamanan petugas Pemeriksa Pajak, Dinas dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum, atau Instansi terkait lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

(7) Dalam rangka pemeriksaan dan pengujian kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, Dinas bersama instansi terkait dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala baik terhadap Wajib Pajak yang berpiutang, Wajib Pajak yang belum mendaftar/melapor, maupun terhadap penambahan/perkembangan jumlah Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak baru yang merupakan Potensi Pajak Daerah.

(8) Bentuk dan isi Surat Perintah Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Bagian Ketiga**

**Pengawasan**

**Pasal 36**

(1) Untuk keperluan pelaksanaan pengawasan, Kepala Dinas berwenang menempatkan Petugas Pengawas yang dilengkapi surat tugas dan/atau peralatan (*equipment*) baik sistem manual dan/atau sistem *online* (komputerisasi) di tempat wajib pajak.

(2) Pengawasan terhadap pembayaran pajak melalui sarana pembayaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menghubungkan mesin komputer yang dimiliki Wajib Pajak yang dipergunakan sebagai sarana transaksi penerimaan, dengan komputer milik Pemerintah Kota melalui sistem jaringan informasi Dinas secara *on line.*

(3) Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai alat kontrol setiap kegiatan transaksi dan biaya pengadaan peralatan tersebut menjadi kewajiban Pemerintah Kota dan/atau Dinas.

(4) Wajib Pajak harus memelihara peralatan (*equipment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak mengubah program yang telah ditentukan oleh Dinas.

(5) Penempatan Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan maksud untuk melaksanakan pengawasan operasional dan penghitungan data omset penjualan dan/atau penerimaan dan/atau pelayanan dan/atau penggunaan dengan batas waktu tertentu dan/atau dengan pertimbangan-pertimbangan teknis tertentu.

(6) Setelah dilakukan pengawasan dengan batas waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk, maka Wajib Pajak berkewajiban untuk mengisi dan menandatangani Berita Acara Hasil Pengawasan.

(7) Apabila terjadi penolakan Wajib Pajak atas penempatan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Wajib Pajak mengajukan surat permohonan penolakan kepada Dinas.

(8) Surat permohonan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat disetujui atau ditolak oleh Dinas berdasarkan pertimbangan teknis dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX**

**KEBERATAN DAN BANDING**

**Bagian Kesatu**

**Keberatan**

**Pasal 37**

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota melalui Kepala Dinas atas suatu SKPDKB, SKPDKBT, SKPDKLB, SKPDN atau STPD Pajak Daerah dan dicatat ke dalam Buku Register Surat Permohonan Keberatan.

(2) Penyelesaian keberatan atas Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas hingga terbitnya Surat Keputusan Walikota tentang Keberatan Pajak.

(3) Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, disertai dengan alasan yang jelas;

b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, maka Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;

c. Surat Permohonan Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau yang diberi kuasa dengan melampirkan Surat Kuasa;

d. Surat Permohonan Keberatan diajukan untuk satu Surat Ketetapan Pajak dan untuk satu tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan fotocopynya; dan

e. permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.

(4) Bentuk dan isi Surat Permohonan Keberatan, dan Register Surat Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXIII, dan Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Pasal 38**

(1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

(2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf e, Kepala Dinas dapat meminta Wajib Pajak melengkapi persyaratan tersebut.

**Pasal 39**

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 40**

(1) Dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Walikota harus memberikan Keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Keberatan.

(2) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.

(3) Apabila Surat Permohonan Keberatan diterima, maka diterbitkan Surat Keputusan Walikota tentang Penerimaan Keberatan Pajak dan apabila Surat Permohonan Keberatan ditolak maka diterbitkan Surat Keputusan Walikota tentang Penolakan Keberatan Pajak.

(4) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat kedalam Buku Register Surat Keputusan Keberatan.

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, permohonan keberatan tidak diberikan jawaban/keputusan, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

(6) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

(7) Bentuk dan isi Surat Keputusan Menerima Keberatan dan Surat Keputusan Penolakan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Buku Register Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran XXXV sampai dengan Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Pasal 41**

(1) Dalam hal Surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, maka :

a. Dinas segera melakukan telaahan yang disampaikan kepada Walikota, dan Walikota memerintahkan Kepala Dinas untuk melakukan pemeriksaan lapangan, yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan;

b. Terhadap Surat permohonan keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Dinas dapat melakukan rapat koordinasi untuk membuat pertimbangan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Koordinasi Pembahasan Keberatan Pajak; dan

c. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atau Laporan Hasil Koordinasi Pembahasan Keberatan Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Dinas membuat telaahan staf kepada Walikota tentang uraian pertimbangan dan penilaian terhadap keberatan Wajib Pajak, agar diterbitkan Surat Keputusan Walikota untuk menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan keberatan Wajib Pajak.

(2) Bentuk dan isi Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Pasal 42**

(1) Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala Dinas dengan persetujuan Walikota dapat membetulkan Surat Keputusan Keberatan Pajak yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan tentang Pajak Daerah.

(2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota melalui Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan, dan disertai dengan pemberian alasan yang jelas.

**Bagian Kedua**

**Banding**

**Pasal 43**

Wajib Pajak hanya dapat mengajukan permohonan banding terhadap Keputusan Keberatan jika pajak terutangnya telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).

**Pasal 44**

(1) Permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 harus disertai dengan Surat Pengantar Permohonan Banding, dan hanya diajukan kepada Pengadilan Pajak terhadap Keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Walikota.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan melampirkan salinan Surat Keputusan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

(4) Terhadap 1 (satu) keputusan keberatan, hanya dapat diajukan 1 (satu) kali surat banding.

(5) Wajib Pajak dapat mengajukan surat pernyataan pencabutan banding kepada Pengadilan Pajak.

(6) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihapus dari daftar sengketa dengan :

a. penetapan Ketua Pengadilan Pajak dalam Surat Pernyataan tentang pencabutan banding yang diajukan sebelum sidang dilaksanakan; dan

b. putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam Surat Pernyataan pencabutan banding yang diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.

(7) Bentuk dan isi Surat Permohonan Banding, dan Surat Pengantar Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXIX, dan Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB X

## PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

### Bagian Kesatu

### Pembetulan Ketetapan

### Pasal 45

(1) Dinas atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan daerah.

(2) Atas permohonan Wajib Pajak, pelaksanaan pembetulan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :

a. permohonan diajukan kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah Surat Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

b. permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dicatat dalam Buku Register Surat Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi;

c. terhadap SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, serta dibuatkan Laporan Hasil Penelitiannya;

d. apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf c ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, maka SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN, atau SKPDLB tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya;

e. pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN, atau SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD baru oleh Kepala Dinas, serta dicatat ke dalam Buku Register Surat Keputusan Pembetulan;

f. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD baru sebagaimana dimaksud dalam huruf e harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan;

g. dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD baru diterima oleh Wajib Pajak, pajak terutang harus dilunasi;

h. dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD baru, maka SKPDKB, SKPDKBT atau STPD sebelumnya menjadi batal, kemudian diberi tanda silang dan diparaf dengan mencantumkan kata "Dibatalkan" dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan; dan

i. dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka Kepala Dinas Pendapatan Daerah segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD serta dicatat ke dalam Buku Register Surat Penolakan Pembetulan.

(3) Bentuk dan isi Surat Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan Sanksi Administrasi, Buku Register Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau pengurangan Sanksi Administrasi, Laporan Hasil Penelitian, Surat Keputusan Pembetulan, Buku Register Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Penolakan Pembetulan, dan Buku Register Surat Penolakan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurup a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf i tercantum dalam Lampiran XLI sampai dengan Lampiran XLVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Bagian Kedua**

**Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi**

**Pasal 46**

(1) Kepala Dinas karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan / atau kenaikan pajak yang terutang, karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan yang disengaja.

(2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan / atau kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan terhadap :

a. sanksi administrasi berupa bunga disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak; dan

b. sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang sudah tertera dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD.

**Paragraf 1**

**Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi berupa Bunga disebabkan Keterlambatan Pembayaran pada Masa Pajak**

**Pasal 47**

(1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak diatur sebagai berikut :

a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan / penghapusan secara tertulis kepada Kepala Dinas dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas, dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan TBP;

c. Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Dinas :

   1. menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi administrasi berupa bunga; atau

   2. memberikan catatan/keterangan pada TBP yang menerangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan, dan dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Dinas.

d. Terhadap permohonan yang diterima, Kepala Dinas :

   1. memberikan catatan/keterangan pada TBP bahwa sanksi tersebut dikurangi atau dihapuskan; dan

   2. membubuhkan tanda tangan dan nama jelas Kepala Dinas pada TPB.

(2) Wajib Pajak melakukan pembayaraan pajak dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

**Paragraf 2**

**Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi berupa Bunga dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD**

**Pasal 48**

(1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan pajak atau STPD adalah sebagai berikut :

a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak Surat Ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan

b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas dengan Surat Pernyataan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya serta melampirkan Surat Ketetapan Pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.

(2) Berdasarkan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dinas segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak maupun lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(3) Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena jabatan, penelitian administrasi dilakukan sesuai permintaan Kepala Dinas atas usulan dari pejabat yang ditunjuknya.

(4) Dalam hal permohonan memerlukan penelitian dan pembahasan materi lebih mendalam, maka Dinas melakukan rapat koordinasi dengan Bidang Pendapatan untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan, kemudian hasilnya dituangkan ke dalam Laporan Hasil Rapat Pembahasan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan sanksi administrasi.

(5) Atas dasar hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), dan/atau hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bidang Pendapatan membuat telaahan uraian pertimbangan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan dari Kepala Dinas.

(6) Dalam hal telaahan uraian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui, maka segera memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan pajak atau STPD sebelumnya yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti Surat Ketetapan pajak atau STPD sebelumnya, serta ditandatangani oleh Kepala Dinas.

(7) Dalam hal telaahan uraian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditolak, maka Dinas segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.

(8) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

## Bagian Ketiga

## Pengurangan dan Pembatalan Ketetapan Pajak

### Pasal 49

(1) Kepala Dinas karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, apabila terdapat :

a. *novum* atau fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang, sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan Surat Ketetapan pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi telah terlampaui; atau

b. *novum* atau fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkannya pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan Surat Ketetapan pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

(2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan pajak.

(3) Pengurangan atau pembatalan Ketetapan pajak atas dasar permohonan Wajib Pajak, ditentukan sebagai berikut:

a. Surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh *novum* atau fakta baru yang meyakinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

b. Dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotocopy :

1. Surat Ketetapan Pajak yang diajukan permohonannya;
2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
3. berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

c. pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

(4) Pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Dinas atau atas usul dari Bidang Pendapatan berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

(5) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan permintaan/usulan karena jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas meminta Bidang Pendapatan untuk membahas pengurangan atau pembatalan Ketetapan pajak.

(6) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.

(7) Berdasarkan laporan Bidang Pendapatan dan telaahan pertimbangan pengurangan/pembatalan Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Dinas memberikan disposisi berupa pernyataan menerima atau menolak pengurangan ketetapan pajak, atau menerima atau menolak pembatalan ketetapan pajak.

(8) Atas dasar disposisi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Bidang Pendapatan memproses penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas berupa :

a. Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan pajak; atau

b. Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak.

(9) Atas diterbitkannya surat keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, Kepala Bidang Pendapatan segera melakukan :

a. pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan Surat Ketetapan pajak yang baru dengan tetap mengurangkan atau memperbaiki Surat Ketetapan pajak yang lama;

b. pemberian tanda silang pada Surat Ketetapan pajak yang lama, dan selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa Surat Ketetapan pajak tersebut "dibatalkan" serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan, serta disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan; dan

c. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima Surat Ketetapan pajak yang baru.

(10) Atas diterbitkannya Surat Keputusan Penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, maka Surat Ketetapan pajak yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan Surat Keputusan.

## BAB XI

## PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

### Pasal 50

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Daerah kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

(2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan ke Kas Umum Daerah atau Bendahara Penerima Dinas berdasarkan :

a. perhitungan dari Wajib Pajak;

b. Surat Keputusan Keberatan atau Surat Keputusan Pembetulan, Pembatalan dan Pengurangan Ketetapan, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;

c. putusan banding atau putusan peninjauan kembali; dan

d. kebijakan pemberian pengurangan dan keringanan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Daerah lainnya oleh Wajib Pajak.

(4) Dalam hal permohonan telah diteliti/ diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan harus memberikan keputusan.

(5) Kelebihan pembayaran pajak yang sudah disetor dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melalui *restitusi,* yakni Wajib Pajak/ Penanggung Pajak mengajukan permohonan kepada Dinas dengan cara :

a. mengajukan Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dengan melampirkan :

1. KTP Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
2. SPTPD, untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan;
3. dokumen perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi dasar permohonan;
4. bukti pembayaran pajak yang menjadi dasar permohonan; dan

5. uraian perhitungan pajak menurut Wajib Pajak.

b. Setelah Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menerima SKPDLB, Kepala Dinas menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak Daerah (SPMKPD); dan

c. Kas Daerah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sesuai SPMKPD dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU).

(6) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung terlebih dahulu diperhitungkan untuk melunasi utang pajak lainnya tersebut.

(7) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan, dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

(8) Bentuk dan isi Surat Permohonan Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak Daerah (SPMKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dan Bukti pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XLVIII sampai dengan Lampiran XLIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB XII

## PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK

### Pasal 51

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan dan keringanan Pajak kepada Dinas.

(2) Permohonan pengurangan dan keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia serta melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon, fotocopy Surat Ketetapan pajak yang dimohonkan dengan mencantumkan alasan yang jelas.

(3) Atas permohonan pengurangan dan keringanan pajak, Bidang Pendapatan melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Berdasarkan telaahan uraian pertimbangan dari Kepala Bidang Pendapatan, Kepala Dinas merekomendasikan untuk menerbitkan Surat Keputusan menolak atau mengabulkan sebagian keberatan Wajib Pajak.

### Pasal 52

(1) Atas permohonan pengurangan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Kepala Dinas hanya dapat memberikan pengurangan Pajak untuk jenis hiburan tertentu setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak.

(2) Pemberian pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan alasan yang dapat diterima, antara lain bahwa hasil penyelenggaraan hiburan digunakan bagi kepentingan sosial, keagamaan dan tidak bersifat komersial.

**Pasal 53**

(1) Permohonan keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), diberikan oleh Dinas, dapat berupa pemberian angsuran pembayaran pajak terutang atau penundaan pembayaran pajak terutang.

(2) Pemberian keringanan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan keadaan tertentu yang dialami Wajib Pajak dan masih dalam ruang lingkup yang diatur oleh Dinas.

**Pasal 54**

(1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olah raga, kesenian daerah, perfilman Nasional, pendidikan, amal, sosial dan keagamaan yang tidak bersifat komersial, Dinas dapat memberikan pengurangan atau keringanan pajak.

(2) Pengurangan atau keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti pajak hiburan yang mencakup:

a. kesenian nasional, seperti : kesenian rakyat/tradisional, seni tari, seni drama, seni suara, dan seni musik (murni);

b. olahraga, seperti olahraga yang bertujuan membina, meningkatkan prestasi olahraga masyarakat, pelajar, mahasiswa, pemuda dan karyawan dalam lingkup daerah dan nasional;

c. perfilman nasional, seperti perfilman nasional yang bertujuan membina pengembangan perfilman nasional yang diberikan terhadap setiap produksi judul film serta pemutarannya;

d. usaha sosial kemanusiaan, seperti yang berbentuk amal, dan untuk bencana alam dan sejenisnya;

e. taman lingkungan wisata, seperti taman yang bersifat monumental, dan taman yang alami; dan

f. taman untuk kepentingan pendidikan.

**Pasal 55**

Surat Permohonan pengurangan atau keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) harus diajukan kepada Dinas, dan harus dilengkapi lampiran persyaratan administrasi sesuai jenis kegiatan yang diselenggarakan, seperti :

a. proposal kegiatan penyelengaraan hiburan tertentu, yang memuat:

1. kegiatan yang akan dilaksanakan;
2. maksud dan tujuan;
3. jenis penyelenggaraan hiburan;
4. jumlah undangan dan harga tanda masuk yang ditentukan;

5. kepanitiaan/organisasi penyelenggara;
6. modal kerja;
7. jadwal kegiatan;
8. perjanjian kerjasama penyelenggara hiburan; dan
9. rincian peruntukan hasil penyelenggaraan hiburan.

b. proposal penyelenggaraan hiburan tetap, yang memuat:
1. kegiatan yang akan dilaksanakan;
2. maksud dan tujuan;
3. jenis penyelenggaraan hiburan;
4. proyeksi jumlah pengunjung dan harga tanda masuk;
5. biodata organisasi penyelenggara;
6. *cash flow*/arus kas;
7. perjanjian kontrak kerjasama/bukti pemilikan hak;
8. akte pendirian;
9. rincian peruntukan hasil penyelenggaraan hiburan;
10. fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon; dan
11. izin penyelenggara hiburan dari instansi yang berwenang.

## BAB XIV

## MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK

### Pasal 56

Mekanisme pemungutan Pajak tercantum dalam Lampiran L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB XV

## PENETAPAN SECARA JABATAN ( *OFFICIAL ASSESMENT* )

## DAN SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 57

(1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dilakukan penerbitan NPWPD secara jabatan oleh Dinas.

(2) Penetapan Pajak Secara Jabatan dilakukan oleh Dinas apabila Wajib Pajak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), ayat (3), ayat (6), ayat (7), dan Pasal 11 ayat (2).

(3) Penetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat pula dilakukan dalam hal Wajib Pajak :

a. tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan omset usaha;

b. menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan omset usaha namun meragukan karena tidak lengkap dan/atau tidak benar;

c. tidak mau/tidak dapat menunjukkan pembukuan dan/atau menolak untuk diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan;

d. tidak menggunakan bukti transaksi;

e. menggunakan bukti transaksi yang tidak bernomor seri dan/atau tidak bernomor urut; dan

f. tidak mendaftar dan melaporkan usaha atau objek pajaknya.

(4) Penetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Dinas, sesuai data dan/atau dokumen lain yang dimiliki.

(5) Sebelum dikenakan perhitungan/penetapan pajak secara jabatan, petugas dinas melakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Omset dasar pengenaan/penetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang sesuai data dan/atau dokumen lain yang dimiliki adalah data omset yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode/ tahapan prioritas pemeriksaan terhadap:

a. hasil kas opname;

b. hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak; dan

c. data pembanding.

(7) Pemeriksaan hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dan dilakukan sebanyak-banyaknya *5* (lima) kali kunjungan dengan waktu dan hari yang berbeda.

(8) Hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan dipakai sebagai nilai omset per hari yang merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan penerimaan kas menurut hasil kas opname tersebut.

(9) Pemeriksaan dari hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, dilakukan dengan tindakan penungguan/pendampingan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) kali sesuai jam operasi, secara terus menerus maupun berselang, secara nyata maupun tersembunyi, secara visual maupun dengan alat bantu rekam elektronik.

(10) Hasil pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dihitung berdasarkan jumlah pengunjung dikali rata-rata besarnya pembayaran yang dilakukan per orang pengunjung dengan daftar menu yang ada pada Wajib Pajak.

(11) Pemeriksaan data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, dilakukan dengan cara membandingkan kondisi usaha Wajib Pajak dengan kondisi usaha lainnya yang sejenis atau sekelas, antara lain berdasarkan fasilitas, kapasitas, klasifikasi lokasi usaha, dan lain-lain secara proporsional atau kondisi usaha antara tahun atau bulan yang sedang diperiksa dengan tahun atau bulan sebelumnya.

(12) Data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat diperoleh berdasarkan data yang ada pada Dinas atau sumber lain yang dapat dipercaya.

**Pasal 58**

(1) Setiap tahun sesudah saat terutangnya pajak dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, penetapan pajak secara jabatan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3), dapat dilakukan dengan menerbitkan :

a. SKPDKB dalam hal :

1. hasil pemeriksaan atau keterangan lain, bahwa pajak terutang ternyata tidak atau kurang dibayar;
2. SPtPD tidak disampaikan kepada Dinas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterima dan setelah ditegur secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali; dan
3. kewajiban mengisi SPtPD tidak dipenuhi.

b. SKPDKBT, dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang; dan

c. SKPDN, apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(2) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(3) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, dikenakan sanksi administratif sebagai berikut :

a. bagi wajib pajak yang mengembalikan SPtPDnya dikenakan sanksi administratif sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak; dan

b. bagi wajib pajak yang tidak mengembalikan SPtPDnya dikenakan sanksi administratif sebesar 25 % (dua puluh lima persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(4) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, dikenakan sanksi administratif yang besarnya sama dengan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

(5) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak.

(6) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

(7) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan SKPDKB, namun dapat diterbitkan lebih dari 1 (satu) kali untuk masa pajak atau tahun pajak yang sama sepanjang ditemukan kembali data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.

(8) Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran LI sampai dengan Lampiran LIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Pasal 59**

(1) Wajib pajak yang menggunakan bukti transaksi tanpa diporporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Wajib Pajak yang menyelenggarakan hiburan dengan tidak mengindahkan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, pajak terutang ditetapkan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20.

(3) Petugas Dinas yang menangani pajak, baik Petugas Pemeriksa, Pengawas, Penagih/Pemungut, Petugas penerima uang jaminan, Bendahara Penerimaan, maupun petugas lainnya yang tidak menyetorkan tagihan pajak dan mengembalikan kelebihan pajak sesuai waktu dan aturan, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 60**

(1) Dalam hal Wajib Pajak yang diawasi/ diperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), ayat (3), dan ayat (6) yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omset atau penerimaan yang tertinggi dalam 1 (satu) tahun pajak terakhir dan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayar.

(2) Hasil penghitungan besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh petugas pemeriksa untuk ditetapkan secara jabatan.

(3) Apabila dalam melakukan pengawasan ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), dan ayat (6), Dinas/petugas Pemeriksa Pajak melaksanakan penghitungan kembali atas pajak terutang yang disetor tertinggi dalam masa pajak berjalan, ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 2 (dua) kali jumlah pajak yang telah disetor terakhir.

**BAB XVI**

**PEMBINAAN**

**Pasal 61**

(1) Dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak, Pemerintah Kota Singkawang, khususnya Dinas, wajib melakukan upaya pembinaan kepada para Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir.

(2) Upaya pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk :

a. penyuluhan perpajakan;

b. sosialisasi peraturan perpajakan;

c. intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan;

d. seminar perpajakan;

e. pembelajaran perpajakan;

f. penghargaan (*reward)* terhadap kepatuhan pajak; dan

g. bentuk-bentuk upaya lain yang dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah.

## BAB XVII

## KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 62

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir yang masih terutang berdasarkan Peraturan Walikota sebelumnya masih dapat ditagih sesuai dengan ketetapan pajak sebelumnya paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

## BAB XVIII

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 63

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku :

a. Keputusan Walikota Singkawang Nomor 139 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2004 Nomor 27 Seri E);

b. Keputusan Walikota Singkawang Nomor 140 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2004 Nomor 28 Seri E);

c. Keputusan Walikota Singkawang Nomor 141 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2004 Nomor 29 Seri E);

d. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2005 Nomor 2); dan

e. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Perparkiran (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2005 Nomor 3),

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 22 Maret 2012

**WALIKOTA SINGKAWANG**

**ttd**

**HASAN KARMAN**

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 22 Maret 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

**ttd**

**SYECH BANDAR**

**BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2012 NOMOR 10**

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan,

**YASMALIZAR, SH**
Pembina
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN : I PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR : 10 TAHUN 2012
TANGGAL : 22 MARET 2012
TENTANG : PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
.....
.....
Jalan .....
.....

No. Formulir : ☐☐☐☐☐☐☐

# FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

Kepada Yth.
.....
.....
Di -
.....

**PERHATIAN :**

1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan hurup CETAK
2. Beri tanda √ pada kotak [ ] yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani harap diserahkan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset paling lambat 7 hari setelah tanggal terima.

## DIISI OLEH SELURUH WAJIB PAJAK

1. Nama Badan / Merk Usaha :
2. Alamat *(Fhoto Copy Surat Keterangan Domisli dilampirkan )*
   a. Jalan / No : .....
   b. RT/RW : .....
   c. Kelurahan : .....
   d. Kecamatan : .....
   e. Kabupaten / Kota : .....
   f. Telepon / HP : ..... Kode Pos ☐☐☐☐☐
3. Surat Izin yang dimiliki *(Fhoto copy Surat Izin harap dilampirkan)*
   a. Surat Izin Tempat Usaha : No. ..... Tgl .....
   b. Surat Izin ..... : No. ..... Tgl .....
   c. Surat Izin ..... : No. ..... Tgl .....
4. Bidang Usaha (Harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)

   [ ] Hotel
   [ ] Restoran
   [ ] Hiburan
   [ ] Reklame
   [ ] Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan
   [ ] Pengelolaan Parkir
   [ ] Air Tanah
   [ ] Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
   [ ] Lainnya .....

KETERANGAN PEMILIK / PENGELOLA

5. Nama Pemilik / Pengelola : .....
6. Jabatan : .....
7. Alamat Tempat Tinggal
   a. Jalan / No : .....
   b. RT/RW : .....
   c. Kelurahan : .....
   d. Kecamatan : .....
   e. Kabupaten / Kota : .....
   f. Telepon / HP : ..... Kode Pos ☐☐☐☐☐

8. Kewajiban Pajak

| | | | |
|---|---|---|---|
| [ ] | Pajak Hotel | [ ] | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan |
| [ ] | Pajak Restoran | [ ] | Pengelolaan Parkir |
| [ ] | Pajak Hiburan | [ ] | Pajak Air Tanah |
| [ ] | Pajak Reklame | [ ] | Pajak Sarang Burung Walet |
| [ ] | Pajak Penerangan Jalan | | |

Singkawang, ..... 20...

Wajib Pajak

(.....)

**DIISI OLEH PETUGAS**

NPWPD yang diberikan

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Tanggal Pengukuhan / Penunjukan :

Nomor Pengukuhan / Penunjukan Sebagai Wapu :

Diterima tanggal : .....

Nama Jelas / NIP : .....

Tanda Tangan : .....

WALIKOTA SINGKAWANG

ttd

HASAN KARMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

YASMALIZAR, SH

Pembina

NIP. 19681016 1998 03 1 004

LAMPIRAN : II PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2012
TANGGAL 22 MARET 2012
TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

# DAFTAR INDUK WAJIB PAJAK

| NO | PENGUKUHAN/PENUNJUKAN | | NAMA | ALAMAT LENGKAP | NPWPD | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | TANGGAL | NOMOR | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Mengetahui :

Kepala Bidang ( yang membidangi )

.....

NIP.

Singkawang, .....

Kepala Seksi ( yang membidangi)

.....

NIP.

WALIKJOTA SINGKAWANG
ttd
**HASAN KARMAN**

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

**YASMALIZAR, SH**
Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004

LAMPIRAN : III PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR : 10 TAHUN 2012
TANGGAL : 22 MARET 2012
TENTANG : PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**
.....
.....
Jalan .....
.....

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS .....**
**KOTA SINGKAWANG**
**NOMOR : ..... TAHUN .....**
**TENTANG**
**PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH**

**KEPALA DINAS .....**

Membaca : Isian Formulir Formulir Pendaftaran yang disampaikan kepada Dinas, Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang Nomor Formulir : ..... tanggal .....

Menimbang : a. bahwa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan baik subjek maupun objek pajak daerah ;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu untuk menetapkan Pengukuhan yang bersangkutan menjadi Wajib Pajak Daerah ; dan

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Singkawang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

2. Peraturan Walikota Singkawang Nomor : .... Tahun 2012 tentang Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Penerangan Jalan.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS ..... KOTA SINGKAWANG TENTANG PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH**

PERTAMA : Mengukuhkan :
Nama / Badan Usaha : .....
Alamat Usaha : .....
: .....

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) : ☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐

Nama Penanggung Pajak Daerah : .....
Alamat Usaha : .....
: .....

Sebagai Wajib Pajak Daerah ;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya ;

DITETAPKAN DI SINGKAWANG
PADA TANGGAL

**KEPALA**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pangkat
NIP. .....

WALIKOTA SINGKAWANG
ttd
HASAN KARMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

**YASMALIZAR, SH**
Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004

LAMPIRAN : IV PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR : 10 TAHUN 2012
TANGGAL : 22 MARET 2012
TENTANG : PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**
.....
.....
Jalan .....
.....

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA SINGKAWANG**
**NOMOR : ..... TAHUN .....**
**TENTANG**
**PENUNJUKKAN SEBAGAI WAJIB PUNGUT**

**KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA SINGKAWANG**

Membaca : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset tentang Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah Nomor ..... tanggal .....

Menimbang : 1. bahwa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan baik subjek maupun objek pajak daerah untuk ditunjuk sebagai wajib Pungut ;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu untuk menetapkan Wajib Pajak yang bersangkutan sebagai Wajib Pungut Pajak Restoran ;

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Singkawang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah ;

2. Peraturan Walikota Singkawang Nomor : .... Tahun 2012 tentang Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Penerangan Jalan.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA SINGKAWANG TENTANG PENUNJUKKAN SEBAGAI WAJIB PUNGUT.**

PERTAMA : Menunjuk
Nama / Badan Usaha : .....
Alamat Usaha : .....
: .....

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) : ☐ ☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐

Nama Penanggung Pajak Daerah : .....
Alamat Usaha : .....
: .....

SEBAGAI WAJIB PUNGUT PAJAK ..... YANG BERKEWAJIBAN MENGHITUNG PAJAK SENDIRI (MPS) ATAU MEMILIKI PEMBUKUAN ATAU KAS REGISTER

KEDUA : Melaksanakan Penyetoran atas Hasil Pemungutan Pajak pada setiap tanggal 7 bulan berikutnya untuk Jenis Pajak Self Assesment atau sebelum tanggal Jatuh Tempo untuk Official Assesment, kecuali tanggal tersebut jatuh pada hari libur.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal .....

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya ;

DITETAPKAN DI SINGKAWANG
PADA TANGGAL

KEPALA DINAS PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KOTA SINGKAWANG

Pangkat
NIP. .....

WALIKOTA SINGKAWANG
ttd
**HASAN KARMAN**

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

**YASMALIZAR, SH**
Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004

LAMPIRAN : V PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR : 10 TAHUN 2012
TANGGAL : 22 MARET 2012
TENTANG : PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
.....
.....
Jalan ..... Telp. (0562) .....
.....

# KARTU NPWPD

**No Register : .....**

Nama Badan Usaha : .....
Alamat : .....
Nama Pemilik : .....
Alamat : .....
.....

NPWPD : ☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐

Singkawang, .....
An. Walikota Singkawang
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

_____
Pangkat
NIP. .....

# PERHATIAN

1. **Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang agar segera melaporkannya kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang.**

2. **Kartu ini hendaknya dibawa apabila Saudara akan melakukan transaksi perpajakan daerah ;**

3. **Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, agar melaporkan diri ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang.**

WALIKOTA SINGKAWANG
ttd
**HASAN KARMAN**

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

**YASMALIZAR, SH**
Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004

LAMPIRAN : VI PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR : 10 TAHUN 2012
TANGGAL : 22 MARET 2012
TENTANG : PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

A. SPtPD HOTEL

| | | |
|---|---|---|
| | PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG<br>.....<br>.....<br>Jalan ..... Telp/Fax .....<br>..... | No SPTPD : .....<br>Masa Pajak : .....<br>Tahun Pajak : ..... |

**SPTPD**
**(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)**
**PAJAK HOTEL**

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
NPWPD : ☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐

Kepada Yth.
.....
.....
di .....

**PERHATIAN** :
1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan hurup CETAK
2. Beri Nomor pada kotak [ ] yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya dan digunakan sebagai media untuk melakukan penyetoran
4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penetapan Secara Jabatan untuk Wajib Pajak yang berdasarkan *Official Assesment* dan Denda *Self Assesment*.

**A. Diisi Oleh Pengusaha Hotel**

1. Golongan Hotel ☐☐
   01. Bintang Tiga
   02. Bintang Empat
   03. Melati Tiga
   04. Melati Dua
   05 Ekonomi
   06. Lainnya .....

2. Data Objek Pajak Hotel ( Lampirkan Bill / Nota Penjualan )

| No | Golongan Kamar | Tarif (Rp) | Jumlah | | Perhitungan Omzet |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kamar | Tamu / Bulan | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| | | | | Jumlah | |

3. Menggunakan Kas Register ☐ 1. Ya ☐ 2. Tidak
4. Mengadakan pembukuan/pencatatan ☐ 1. Ya ☐ 2. Tidak
5. Jumlah Pembayaran Pajak Terutang untuk Masa Pajak Sekarang (lampirkan fotocopy dokumen) :
   a. Masa Pajak : Tgl. ..... s/d .....
   b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima : Rp. .....
   c. Tarif Pajak (sesuai Perda) : 8% .....
   d. Pajak Terhutang ( b x c ) : Rp. .....

**B. Pernyataan**

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Singkawang, .....

Wajib Pajak

_____

Nama Jelas

**C. Diisi Oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset**

Tata Cara penghitungan dan penetapan yang dikehendaki :

☐ 1. Self Assesment (menghitung dan menetapkan pajak sendiri)

2. Official Assesment (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Diterima tanggal :
Nama Petugas :
NIP :

Tanda Tangan :

**B. SPtPD RESTORAN**

| | | |
|---|---|---|
| | **PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**<br>.....<br>.....<br>**Jalan ..... Telp/Fax ...**<br>..... | No SPTPD : .....<br>Masa Pajak : .....<br>Tahun Pajak : ..... |

# SPTPD
## (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
## PAJAK RESTORAN

**Nama Wajib Pajak** :

**Alamat** :

**NPWPD** : ☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐

Kepada Yth.
.....
.....
di .....

**PERHATIAN** :

1. **Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan hurup CETAK**
2. Beri Nomor pada kotak [ ] yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. **Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya dan digunakan sebagai media untuk melakukan penyetoran**
4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut di aatas akan dilakukan Penetapan Secara Jabatan untuk Wajib Pajak yang berdasarkan *Official Assesment* dan Denda untuk *Self Assesment*.

**A. Diisi Oleh Pengusaha Restoran**

1. Golongan Restoran ☐☐
   - 01. Rumah Makan
   - 02. Rumah Minum
   - 03 Cafe
   - 04 .....

2. Data Objek Pajak Restoran (Lampirkan Bill / Nota Penjualan)

| No | Meja Yang Tersedia | Jumah Kursi | Jumlah | | Perhitungan Omzet |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Perhari | Tamu Per Bulan | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| | | | | **Jumlah** | |

3. Menggunakan kas register ☐
   1. Ya
   2. Tidak

4. Menggadakan Pembukuan / Pencatatan ☐
   1. Ya
   2. Tidak

5. Jumlah Pembayaran Pajak Terutang untuk Masa Pajak Sekarang (lampirkan fotocopy dokumen) :
   a. Masa Pajak : Tgl ..... s/d Tgl .....
   b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) : Rp. .....
   c. Tarif Pajak (sesuai Perda) : 8%
   d. Pajak Terhutang ( b x c ) : Rp. .....

**B. Pernyataan**

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Singkawang, .....

Wajib Pajak

_____

Nama Jelas

**C. Diisi Oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset**

Tata Cara penghitungan dan penetapan yang dikehendaki :

☐ 1. **Self Assesment (menghitung dan menetapkan pajak sendiri)**

2. Official Assesment (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Diterima tanggal :
Nama Petugas :
NIP :

Tanda Tangan :

C. SPtPD HIBURAN

| | |
|---|---|
| PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG<br>.....<br>.....<br>Jalan ..... Telp/Fax .....<br>..... | No SPTPD : .....<br>Masa Pajak : .....<br>Tahun Pajak : ..... |

**SPTPD**

**(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)**

**PAJAK HIBURAN**

**Nama Wajib Pajak** : .....
**Alamat** :

**NPWPD** : ☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐

Kepada Yth.
.....
.....
Di -
**Singkawang**

**PERHATIAN :**
1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan hurup CETAK
2. Beri Nomor pada kotak [ ] yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
3. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya dan digunakan sebagai media untuk melakukan penyetoran.
4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penetapan Secara Jabatan untuk Wajib Pajak yang berdasarkan *Official Assesment* dan Denda *Self Assesment.*

**A. Diisi Oleh Pengusaha Hiburan**

1. Hiburan yang diselenggarakan ☐☐
   - 01. Pertunjukan Film
   - 02. Pertunjukan kesenian dan olahraga
   - 03. Pagelaran musik dan tari
   - 04. Diskotik
   - 05. Karaoke
   - 06. Klab Malam
   - 07. Permainan Billyard
   - 08. Permainan Ketangkasan
   - 09. Panti Pijat / Mandi Uap
   - 10. Pertandingan Olahraga
   - 11. .....

2. Harga Tanda Masuk yang berlaku (sertakan bonggol Karcis)
   *(Khusus untuk pertunjukan film, kesenian, pagelaran musik/tari, ketangkasan dan pertandingan olahraga dan sejenisnya)*

| No | Kelas | Tarif | Jumlah Pertunjukkan | | Perhitungan Omzet |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Biasa | Libur | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| | | | | Jumlah | |

3. Jumlah Meja / Mesin : buah
   *(Khusus untuk Billyard dan Ketangkasan Lainnya)*

4. Jumlah Kamar / Ruangan : buah
   *(Khusus untuk Panti Pijat, Mandi Uap dan Karaoke)*

5. Apakah Pengusaha menyediakan karcis bebas (free) kepada orang-orang tertentu :
   ☐ 1. Ya
   2. Tidak

   Jika YA, berapa jumlah yang beredar : buah

6. Melakukan Pembukuan / Pencatatan
   ☐ 1. Ya

   2. Tidak

7. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak Sekarang :
   a. Masa Pajak : Tgl ..... s/d Tgl .....
   b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) : Rp. .....
   c. Tarif Pajak (sesuai Perda) : ..... %
   d. Pajak Terhutang ( b x c ) : Rp. .....

**B. Pernyataan**

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Singkawang, .....

Wajib Pajak

_____

Nama Jelas

**C. Diisi Oleh Petugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset**

Tata Cara penghitungan dan penetapan yang dikehendaki :

☐ 1. *Self Assesmen*t (menghitung dan menetapkan pajak sendiri)

2. *Official Assesment* (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Diterima tanggal :
Nama Petugas :
NIP :

Tanda Tangan :

D. SPtPD PARKIR

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
.....
.....
Jalan ..... Telp/Fax .....
.....

No SPTPD : .....
Masa Pajak : .....
Tahun Pajak : .....

# SPTPD
## (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
## PAJAK PARKIR

**Nama Wajib Pajak** :

**Alamat** :

**NPWPD** : ☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐

Kepada Yth.
.....
.....
di .....

**PERHATIAN** :
1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan hurup CETAK
2. Beri Nomor pada kotak [ ] yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
3. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya dan digunakan sebagai media untuk melakukan penyetoran.
4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut di aatas akan dilakukan Penetapan Secara Jabatan untuk Wajib Pajak yang berdasarkan *Official Assesment* dan Denda untuk *Self Assesment*.

### A. Diisi Oleh Pengelola Parkir

1. Fasilitas Parkir yang disediakan ☐
   - 01. Kendaraan Roda Empat
   - 02. Kendaraan Roda Dua
   - 03. Kendaraan Roda Empat / Roda Dua
   - 04. Kendaraan Lainnya

2. Jumlah Kendaraan dan Tarif Parkir

| No | Jenis Kendaraan | Jumlah Kendaraan yang Parkir | | Tarif Parkir (Rp) | | Perhitungan Omzet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nginap | Biasa | Nginap | Biasa | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Jumlah | |

3. Apakah Pengusaha menyediakan karcis bebas (free) kepada orang-orang tertentu :

   ☐ 1. Ya

   2. Tidak

   Jika YA, berapa jumlah yang beredar : buah

4. Melakukan Pembukuan / Pencatatan

   ☐ 1. Ya

   2. Tidak

5. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Paja Sekarang :
   a. Masa Pajak : Tgl ..... s/d Tgl .....
   b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima : Rp. .....
   c. Tarif Pajak (sesuai Perda) : 20%
   d. Pajak Terhutang ( b x c ) : Rp. .....

**B. Pernyataan**

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku, saya atau saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Singkawang, .....

Wajib Pajak

_____

Nama Jelas

**C. Diisi Oleh Petugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset**

Tata Cara penghitungan dan penetapan yang dikehendaki :

☐ 1. *Self Assesmen*t (menghitung dan menetapkan pajak sendiri)

2. *Official Assesment* (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Diterima tanggal :
Nama Petugas :
NIP :

Tanda Tangan :

**E. SPtPD PAJAK PENERANGAN JALAN**

| | | |
|---|---|---|
| | **PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**<br>.....<br>.....<br>**Jalan ..... Telp/Fax .....**<br>..... | No SPTPD : .....<br>Masa Pajak : .....<br>Tahun Pajak : ..... |

**SPTPD**

**(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)**

**PAJAK PENERANGAN JALAN**

**Nama Wajib Pajak** :

**Alamat** :

**NPWPD** : ☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐

Kepada Yth.
.....
.....
di .....

**PERHATIAN** :

1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan hurup CETAK
2. Beri Nomor pada kotak [ ] yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya dan digunakan sebagai media untuk melakukan penyetoran
4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut di aatas akan dilakukan Penetapan Secara Jabatan untuk Wajib Pajak yang berdasarkan *Official Assesment* dan Denda untuk *Self Assesment*.

**A. Diisi Oleh Wajib Pajak**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Asal Tenaga Listrik | [ ] | 01. | PLN | |
| | | 02. | Non PLN | |
| 2. Golongan Tarif | [ ] | 01. | Industri Bisnis | |
| | | 02. | Rumah Tangga | |
| | | 03. | Sosial | |
| | | 04. | ..... | |
| 3. Voltase | [ ] | 01. | 110 Volt | |
| | | 02. | 220 Volt | |
| | | 03. | ..... | |
| 4. Daya Listrik | [ ] | 01. | 450 | Watt |
| | | 02. | 900 | Watt |
| | | 03. | 1.200 | Watt |
| | | 04. | 1.600 | Watt |
| | | 05. | 2.200 | Watt |
| | | 06. | > 2.200 | Watt |

5. Tarif listrik per KWH Rp. .....

6. Penggunaan listrik / taksiran penggunaan listrik Bulan .....
   Jumlah KWH Terpakai : .....

7. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Paja Sekarang :
   a. Masa Pajak : Tgl ..... s/d Tgl .....
   b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima : Rp. .....
   c. Tarif Pajak (sesuai Perda) : 5 %
   d. Pajak Terhutang ( b x c ) : Rp. .....

**B. Pernyataan**

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Singkawang, .....

Wajib Pajak

_____

Nama Jelas

**C. Diisi Oleh Petugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset**

Tata Cara penghitungan dan penetapan yang dikehendaki :

☐ 1. **Self Assesment (menghitung dan menetapkan pajak sendiri)**

2. Official Assesment (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Diterima tanggal :
Nama Petugas :
NIP :

Tanda Tangan :

WALIKOTA SINGKAWANG
ttd
**HASAN KARMAN**

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

**YASMALIZAR, SH**
Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004

LAMPIRAN : VII PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2012
TANGGAL 22 MARET 2012
TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

# DAFTAR SPTPD

YANG DIKIRIM / KEMBALI / BELUM DIKEMBALIKAN

| NO | NOMOR FORMULIR | NAMA | ALAMAT | NPWPD | TANGGAL | | KETERANGAN ( SELF / OFFICIAL* ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | KIRIM | KEMBALI | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Mengetahui :

Kepala Bidang ( yang membidangi )

.....

NIP.

Singkawang, .....

Kepala Seksi ( yang membidangi)

.....

NIP.

**B. DAFTAR SPTPD WAJIB PAJAK SELF ASSESMENT**

| No | Tanggal Terima | Nomor Urut | Kode Rekening | SPTPD | | | NPWPD | Nama WP | Jumlah Omzet Pajak | | | | | | Jenis Pajak Terutang | | | | | | Sisa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nomor | Masa Pajak | Thn Pajak | | | Hotel | Restoran | Hiburan | MBLB | Parkir | SB.Walet | Hotel | Restoran | Hiburan | MBLB | Parkir | SB.Walet | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Mengetahui
Kepala Bidang (yang membidangi)

.....
NIP.

Singkawang, ..... 200 ....
Kepala Seksi ( yang membidangi)

.....
NIP.

WALIKJOTA SINGKAWANG
ttd
**HASAN KARMAN**

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

**YASMALIZAR, SH**
Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004

LAMPIRAN : VIII PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR : 10 TAHUN 2012
TANGGAL : 22 MARET 2012
TENTANG : PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

**A. KARTU DATA PAJAK HOTEL**

## KARTU DATA PAJAK HOTEL

Tahun Pajak .....

NPWPD ☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐

1. Nama Badan Usaha : .....
2. Alamat : .....
3. Nama Pemilik : .....
4. Alamat : .....

A. Objek Pajak Hotel
Golongan Hotel ☐☐

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01. | Bintang Tiga | 04. | Melati Dua |
| 02. | Bintang Empat | 05 | Ekonomi |
| 03. | Melati Tiga | 06. | Lainnya ..... |

| No | Golongan Kamar | Tarif (Rp) | Jumlah Kamar |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

B. Diisi Untuk Objek Pajak Hotel
1. Menggunakan Kas Register [ ] 1. Ya 2. Tidak
2. Menggunakan Pembukuan/Pencatatan [ ] 1. Ya 2. Tidak
3. Jumlah Omset dan setoran yang dilakukan

| No | Tanggal | Masa | Omset (Rp) | Tanggal Setor | Jumlah Setoran |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Mengetahui
Kepala Bidang Pendapatan

(.....)
NIP.

Diperiksa
Kasi Pendataan Penetapan

(.....)
NIP

**B. KARTU DATA PAJAK RESTORAN**

# KARTU DATA PAJAK RESTORAN

Tahun Pajak .....

**NPWPD** ☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐

1. Nama Badan Usaha : .....
2. Alamat : .....
3. Nama Pemilik : .....
4. Alamat : .....

A. Objek Pajak Restoran

Golongan Restoran ☐☐

01. Rumah Makan
02. Rumah Minum
03. Cafe

| No | Jumlah Meja | Jumlah Kursi | Jumlah Tamu / Hari |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

B. Diisi Untuk Objek Pajak Restoran

1. Menggunakan Kas Register [ ] 1. Ya 2. Tidak
2. Menggunakan Pembukuan/Pencatatan [ ] 1. Ya 2. Tidak
3. Jumlah Omset dan setoran yang dilakukan

| No | Tanggal | Masa | Omset (Rp) | Tanggal Setor | Jumlah Setoran |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Mengetahui
Kepala Bidang Pendapatan

(.....)
NIP.

Diperiksa
Kasi Pendataan Penetapan

(.....)
NIP

**C. KARTU DATA PAJAK HIBURAN**

# KARTU DATA PAJAK HIBURAN

Tahun Pajak .....

**NPWPD** ☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐

1. Nama Badan Usaha : .....
2. Alamat : .....
3. Nama Pemilik : .....
4. Alamat : .....

1. Jenis Hiburan :

☐☐

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01. | Pertunjukan Film | 06. | Klab Malam |
| 02. | Pertunjukan kesenian dan olahraga | 07. | Permainan Billyard |
| 03. | Pagelaran musik dan tari | 08. | Permainan Ketangkasan |
| 04. | Diskotik | 09. | Panti Pijat / Mandi Uap |
| 05. | Karaoke | 10. | Pertandingan Olahraga |
| | | 11. | ..... |

2. Tarif, Fasilitas, dan Waktu Pertunjukan

2.1. Bilyard dan Permainan Ketangkasan

a. Jumlah Meja / Mesin : ..... buah
b. Tarif per meja / Game : Rp. .....
c. Rata-rata kegiatan / hari : ..... jam

2.2. Panti Pijat, Karaoke dan Mandi Uap

| No | Kelas Kamar | Jumlah Kamar | Tarif | Tamu / Hari |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

3. Jumlah yang dibayar dan setoran yang dilakukan

| No | Tanggal | Masa | Jumlah yang dibayar | Tanggal Setor | Jumlah Setoran |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Mengetahui
Kepala Bidang Pendapatan

(.....)
NIP.

Diperiksa
Kasi Pendataan Penetapan

(.....)
NIP

**D. KARTU DATA PAJAK PARKIR**

# KARTU DATA PAJAK PARKIR

Tahun Pajak .....

NPWPD ☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐

1. Nama Badan Usaha : .....
2. Alamat : .....
3. Nama Pemilik : .....
4. Alamat : .....

1. Jenis Kendaraan : ☐☐

01. Kendaraan Roda Empat
02. Kendaraan Roda Dua
03. Kendaraan Roda Empat / Roda Dua
04. Kendaraan Lainnya

| No | Jenis Kendaraan | Jumlah Kendaraan | Tarif |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

3. Jumlah yang dibayar dan setoran yang dilakukan

| No | Tanggal | Masa | Jumlah yang dibayar | Tanggal Setor | Jumlah Setoran |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Mengetahui
Kepala Bidang Pendapatan

(.....)
NIP.

Diperiksa
Kasi Pendataan Penetapan

(.....)
NIP

**E. KARTU DATA PAJAK PARKIR**

## KARTU DATA PAJAK PENERANGAN JALAN

Tahun Pajak .....

NPWPD ☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐

1. Nama Badan Usaha : .....
2. Alamat : .....
3. Nama Pemilik : .....
4. Alamat : .....

1. Asal Tenaga Listrik : [ ] 1. PLN 2. Non PLN
2. Golongan Tarif : [ ] 1. Industri 2. Rumah Tangga 3. Sosial
3. Volume : [ ] 1. 110 Volt 2. 450 Volt 3. 990 Volt
   4. 1600 Volt 5. 2200 Volt 6. > 2200 Volt

3. Penggunaan Listrik dan Setoran yang dilakukan

| No | Tanggal | Masa | Jumlah Kwh yang terpakai | Tanggal Setor | Jumlah Setoran |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Mengetahui
Kepala Bidang Pendapatan

(.....)
NIP.

Diperiksa
Kasi Pendataan Penetapan

(.....)
NIP

WALIKOTA SINGKAWANG
ttd
**HASAN KARMAN**

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

**YASMALIZAR, SH**
Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004

LAMPIRAN : IX PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2012
TANGGAL 22 MARET 2012
TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

# DAFTAR SURAT TEGURAN
## UNTUK MEMASUKKAN SPTPD

Halaman :

| NO | SURAT | | NAMA | ALAMAT LENGKAP | NPWPD | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | TANGGAL | NOMOR | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Mengetahui :

Kepala Bidang ( yang membidangi )

.....
NIP.

Singkawang, .....

Kepala Seksi ( yang membidangi)

.....
NIP.

WALIKJOTA SINGKAWANG
ttd
**HASAN KARMAN**

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

**YASMALIZAR, SH**
Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004

LAMPIRAN : X SALINAN PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR : 10 TAHUN 2012
TANGGAL : 22 MARET 2012
TENTANG : PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**
.....
.....
**Jalan ..... Telp/Fax .....**
.....

**NPWPD :**

☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐

Kepada Yth.
.....
.....
di .....

# SURAT TEGURAN

UNTUK MEMASUKKAN SPTPD
Nomor : .....

Berdasarkan catatan kami, ternyata sampai saat ini Saudara belum memasukkan SPTPD yang telah saudara terima untuk diisi.

Maka dengan ini kami minta agar Saudara menyerahkan kembali SPTPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat ini

Apabila Surat Teguran ini tidak juga Saudara indahkan, maka kami akan melakukan Penetapan Atas Objek Pajak yang saudara miliki secara jabatan.

Untuk menjadi perhatian Saudara, agar kewajiban saudara dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

....., .....

a.n. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
**Kepala Bidang**
**(Kepala Bidang yang Membidangi)**

(.....)
**NIP**

---------- Gunting Disini ----------

**TANDA TERIMA**

Nama : .....

Alamat : .....

Singkawang, .....

Yang Menerima,

---

WALIKOTA SINGKAWANG
ttd
**HASAN KARMAN**

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

**YASMANZAR, SH**
Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004

LAMPIRAN : XI

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2012
TANGGAL 22 MARET 2012
TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

**KOP**

Nomor : .....
Sifat : .....
Lampiran : .....
Perihal : Permohonan Porporasi

Kepada
Yth. .....
.....
di - .....

Bersama ini kami sampaikan permohonan legalisasi / poprporasi tiket tanda masuk ..... dengan rincian sebagai berikut :

Nomor Seri :
Harga :
banyaknya :
Warna

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Singkawang, .....

Pemohon

WALIKJOTA SINGKAWANG
ttd
**HASAN KARMAN**

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

**YASMALIZAR, SH**
Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004

LAMPIRAN : XII

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2012
TANGGAL 22 MARET 2012
TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

## PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
### TANDA BUKTI PEMBAYARAN
**Nomor : .....**

Bendahara Penerimaan .....
Telah menerima uang sebesar : Rp. .....
dengan hurup : ( ..... )
Dari Nama : .....
Alamat : .....
Sebagai Pembayaran : .....
.....
.....

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |
| | Jumlah ..... | |

Tanggal terima uang

Mengetahui
**Bendahara Penerimaan**

Nama Lengkap
.....
NIP. .....

**Pembayar / Penyetor**

Nama Lengkap
.....

Lembar Asli : Untuk Pembayar / Penyetor / Pihak Ketiga
Salinan 1 : Untuk Bendahara
Salinan 2 : Arsip

WALIKJOTA SINGKAWANG
ttd
**HASAN KARMAN**

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

**YASMALIZAR, SH**
Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004

LAMPIRAN : XIII

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2012
TANGGAL 22 MARET 2012
TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

# PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
## SURAT TANDA SETORAN
## ( STS )

**STS No** : .....

Bank : Bank Kalbar
No. Rekening : .....

Harap diterima uang sebesar Rp. .....
**Dengan Hurup** ( ..... )

Dengan Rincian sebagai berikut :

| No | Kode Rekening | Uraian Rincian Obyek | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | Jumlah ..... | |

Uang tersebut diterima pada tanggal .....

Mengetahui
**Pengguna Anggaran**

Nama Lengkap
.....
NIP. .....

**Bendahara Penerimaan**

Nama Lengkap
.....
NIP. .....

WALIKJOTA SINGKAWANG
ttd
**HASAN KARMAN**

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

**YASMALIZAR, SH**
Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004

**LAMPIRAN : XIV PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG**
**NOMOR : 10 TAHUN 2012**
**TANGGAL : 22 MARET 2012**
**TENTANG : PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN.**

....., .....

Perihal : Permohonan Angsuran

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang

di - **Singkawang**

Dengan hormat.

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama Pemilik : .....
Alamat : .....
.....

Bertindak untuk dan atas nama
Nama Badan Usaha : .....
NPWPD : ☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐
Alamat .....
.....

Mengakui masih mempunyai Hutang Pajak atas SKP-D/SKPDT/SKPDKB/SKPDKBT/SKPD-Jab/STPD *) ..... Bulan ..... Nomor Kohir : ..... berjumlah Rp. .....

Dengan ini mengajukan Permohonan Angsuran agar kiranya Hutang Pajak di atas dapat disetor dengan cara ansuran sebanyak ..... (.....) kali dengan masing-masing tersebut di bawah dan akan lunas seluruhnya paling lambat tanggal .....

| RINCIAN ANGSURAN | |
|---|---|
| **TANGGAL PENYETORAN** | **JUMLAH ANSURAN** |
| ..... | Rp. ..... |
| ..... | Rp. ..... |
| ..... | Rp. ..... |
| ..... | Rp. ..... |

Atas pengajuan Permohonan Angsuran ini

Demikian permohonan ini saya buat dengan harapan dapat dipenuhi

Tanda Terima

Nama :
NIP :
Jabatan :
Tanda Tangan :

Hormat Saya
Pemohon

(.....)

**WALIKOTA SINGKAWANG**
ttd
**HASAN KARMAN**

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

**YASMALIZAR, SH**
Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004

**LAMPIRAN : XV PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG**
**NOMOR : 10 TAHUN 2012**
**TANGGAL : 22 MARET 2012**
**TENTANG : PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN.**

.....,.....

Perihal : ***Permohonan Penundaan Pembayaran***

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang

di - **Singkawang**

Dengan hormat.

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama Pemilik : .....
Alamat : .....
.....

Bertindak untuk dan atas nama
Nama Badan Usaha : .....
NPWPD : ☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐
Alamat .....
.....

Dengan ini mengajukan Permohonan Penundaan Pembayaran atas SKPD / SKPD-T / SKPD-KB / SKPD-KBT / SKPD - Jabatan / STPD dengan Nomor Kohir : ... yang akan jatuh tempo pada tanggal ... agar kiranya tanggal jatuh tempo dapat diperpanjang / ditunda hingga tanggal ...

Atas pengajuan Permohonan Penundaan Pembayaran ini

Demikian permohonan ini saya buat dengan harapan dapat dipenuhi

Tanda Terima

Nama :
NIP :
Jabatan :
Tanda Tangan :

Hormat Saya
Pemohon

(.....)

WALIKOTA SINGKAWANG
ttd
**HASAN KARMAN**

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

**YASMALIZAR, SH**
Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004

LAMPIRAN : XVI PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2012
TANGGAL 22 MARET 2012
TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

## BUKU REGISTER PERMOHONAN ANGSURAN

| No | Tanggal | Surat Permohonan | | Nama | Alamat | NPWPD | Surat Ketetapan | | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tanggal | Nomor | | | | Jenis Ketetapan | Tanggal | Nomor | Jumlah | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

WALIKJOTA SINGKAWANG
ttd
HASAN KARMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

YASMALIZAR, SH
Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004

LAMPIRAN : XVII PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2012
TANGGAL 22 MARET 2012
TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

## BUKU REGISTER PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

| No | Tanggal | Surat Permohonan | | Nama | Alamat | NPWPD | Surat Ketetapan | | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tanggal | Nomor | | | | Jenis Ketetapan | Tanggal | Nomor | Jumlah | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

WALIKOTA SINGKAWANG
ttd
HASAN KARMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

YASMALIZAR, SH
Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004

LAMPIRAN : XVIII PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR : 10 TAHUN 2012
TANGGAL : 22 MARET 2012
TENTANG : PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
.....
.....
Jalan ..... Telp/Fax .....
.....

# SURAT PERJANJIAN ANGSURAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama Pemilik : .....
Alamat : .....
.....

Bertindak untuk dan atas nama
Nama Badan Usaha : .....
NPWPD : ☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐
Alamat .....
.....

Dengan ini menyatakan, telah menyampaikan Permohonan Angsuran Pembayaran Hutang Pajak pada tanggal ..... sebanyak ..... (...) kali angsuran terhadap Surat Ketetapan Pajak yang diterima berupa .... Nomor Kohir ... tanggal ... sebesar Rp. ....

| Pembayaran Angsuran | | Jumlah Ketetapan | Bunga | Jumlah Angsuran |
|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Angsuran Ke | | | |
| ..... | I | ..... | ..... | ..... |
| ..... | II | ..... | ..... | ..... |
| ..... | III | ..... | ..... | ..... |
| ..... | IV | ..... | ..... | ..... |
| Total Keseluruhan | | ..... | ..... | ..... |

Jika pernyataan pembayaran pada di atas tidak dipenuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Tanda Terima

Nama :
NIP :
Jabatan :
Tanda Tangan :

Hormat Saya
Yang berjanji,

(.....)

WALIKOTA SINGKAWANG
ttd
HASAN KARMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

YASMALIZAR, SH
Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004

LAMPIRAN : XIX PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2012
TANGGAL 22 MARET 2012
TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

## DAFTAR SURAT PERJANJIAN ANGSURAN

| No | Perjanjian Angsuran | | Nama | Alamat | NPWPD | Jumlah Ketetapan Sebelumnya | Banyaknya Angsuran | Jumlah Setiap Angsuran | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tanggal | Nomor | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

WALIKOTA SINGKAWANG
ttd
HASAN KARMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

YASMALIZAR, SH
Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004

LAMPIRAN : XX PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR : 10 TAHUN 2012
TANGGAL : 22 MARET 2012
TENTANG : PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
.....
.....
Jalan ..... Telp/Fax .....
.....

# SURAT PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama Pemilik : .....
Alamat : .....
.....

Bertindak untuk dan atas nama
Nama Badan Usaha : .....
NPWPD : ☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐
Alamat .....
.....

1. Dengan ini menyatakan, telah menyampaikan Permohonan Angsuran Pembayaran Hutang Pajak pada tanggal ..... terhadap Ketetapan ..... dengan Nomor Kohir : ..... dan jatuh tempo tanggal .....
2. Berdasarkan Permohonan di atas, maka telah disepakati bahwa pembayaran atas hutang pajak di atas ditunda pembayarannya sampai dengan tanggal .....
3. Jika pernyataan pembayaran pada sub 2 (dua) di atas tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Mengetahui dan menyetujui
.....

.....
NIP. .....

Singkawang, ....., ....
Pemohon

.....

WALIKOTA SINGKAWANG
ttd
HASAN KARMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

YASMALIZAR, SH
Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004

LAMPIRAN : XXI PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2012
TANGGAL 22 MARET 2012
TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

# DAFTAR PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

| No | Persetujuan Penundaan | | Nama | Alamat | NPWPD | Tanggal Jatuh Tempo Sebelumnya | Tanggal Penundaan Pembayaran | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tanggal | Nomor | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

WALIKJOTA SINGKAWANG
ttd
HASAN KARMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

YASMALIZAR, SH
Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004

LAMPIRAN : XXII PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR : 10 TAHUN 2012
TANGGAL : 22 MARET 2012
TENTANG : PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
.....
.....
Jalan ..... Telp/Fax.....
.....

# SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN

Setelah kami mempelajari dan mempertimbangkan, dengan ini diberitahukan bahwa surat permohonan angsuran saudara tanggal ..... dengan Nomor Kohir : ..... dengan sangat menyesal tidak dapat kami penuhi

Demikian agar saudara maklum adanya.

Singkawang, ....., ....
.....

.....
NIP. .....

WALIKOTA SINGKAWANG
ttd
**HASAN KARMAN**

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

**YASMALIZAR, SH**
Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004

LAMPIRAN : XXIII PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR : TAHUN 2012
TANGGAL : MARET 2012
TENTANG : PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
.....
.....
Jalan ..... Telp/Fax.....
.....

# SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Setelah kami mempelajari dan mempertimbangkan, dengan ini diberitahukan bahwa surat Permohonan Penundaan Pembayaran saudara tanggal ..... dengan Nomor Kohir : ..... dengan sangat menyesal tidak dapat kami penuhi

Demikian agar saudara maklum adanya.

Singkawang, ....., ....
.....

.....
NIP. .....

WALIKOTA SINGKAWANG
ttd
**HASAN KARMAN**

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

**YASMALIZAR, SH**
Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004

LAMPIRAN : XXIV PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR : TAHUN 2012
TANGGAL : MARET 2012
TENTANG : PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

| | PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG<br>.....<br>.....<br>Jalan ..... Telp / Fax .....<br>..... | **STPD**<br>**SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH** | NOMOR KOHIR |
|---|---|---|---|

**MASA PAJAK :**
**TAHUN :**

**NAMA BADAN USAHA :**
**ALAMAT :**
**NPWPD :**

I Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 telah dilakukan Pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

Kode Rekening : .....
Nama Rekening : .....

II Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Pajak yang kurang dibayar Rp. .....
2. Sanksi Administrasi :
   - Bunga (Pasal 10 Ayat 3) Rp. .....
6. Jumlah yang masih harus dibayar ( 1 + 2a ) Rp. .....

Dengan Hurup [ ]

**PERHATIAN :**

1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendarawan Penerima atau Kas Umum Daerah (Bank Kalbar) dengan menggunakan Tanda Bukti Setoran (STS)
2. Apabila STPD ini tidak atau kurang bayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah STPD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari pokok pajak ;

Singkawang, .....
An. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kepala Bidang (yang membidangi)

---
.....
NIP. .....

NO. Kohir .....

**TANDA TERIMA**

NPWPD : .....
NAMA : .....
ALAMAT : .....
JUMLAH YANG DIBAYAR : Rp. .....

Singkawang. .....
Yang Menerima

(----------)

WALIKOTA SINGKAWANG
ttd
**HASAN KARMAN**

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

**YASMALIZAR, SH**
Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004

LAMPIRAN : XXV PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR TAHUN 2012
TANGGAL MARET 2012
TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

# DAFTAR SURAT TEGURAN / PAKSA

| NO | SURAT INI | | SURAT SEBELUMNYA | | NAMA | ALAMAT LENGKAP | NPWPD | JUMLAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TANGGAL | NOMOR | TANGGAL | NOMOR | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Mengetahui :

Kepala Bidang ( yang membidangi )

.....
NIP.

Singkawang, .....

Kepala Seksi ( yang membidangi)

.....
NIP.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

YASMALIZAR, SH
Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004

WALIKOTA SINGKAWANG
ttd
HASAN KARMAN

**LAMPIRAN : XXVI PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG**
**NOMOR 10 TAHUN 2012**
**TANGGAL 22 MARET 2012**
**TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN.**

**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**
.....
.....
**Jalan ..... Telp/Fax .....**
.....

NPWPD : ☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐

Kepada Yth
.....
.....
di -
.....

# SURAT TEGURAN

Nomor : .....

Menurut Pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak melalui Media Ketetapan ..... Adalah sebagai berikut :

| No | Rekening | | No. Kohir | Bulan / Tahun | Tanggal Jatuh Tempo | Jumlah Tunggakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kode | Kode | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Jumlah ..... | |

Dengan Huruf : ( ..... )

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran ini. Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada kami ( ..... Penagihan )

**PERHATIAN**
PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 7 HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI, SESUDAH BATAS WAKTU ITU TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYERAHAN SURAT PAKSA
**(PASAL 31 PERWAKO SINGKAWANG NOMOR 10 TAHUN 2012)**

Singkawang, ....., ....
.....

.....
NIP.

WALIKOTA SINGKAWANG
ttd
**HASAN KARMAN**

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

**YASMALIZAR, SH**
Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004

LAMPIRAN : XXVII PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2012
TANGGAL 22 MARET 2012
TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
.....
.....
Jalan ..... Telp/Fax .....
.....

# SURAT PAKSA

Nomor : .....

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
## WALIKOTA SINGKAWANG

Nama Penanggung Pajak : .....

Alamat : .....

NPWPD : ☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐

Menunggak pajak sebagaimana tercantum di bawah ini :

| No | Rekening | | No. Kohir | Bulan / Tahun | Tanggal Jatuh Tempo | Jumlah Tunggakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kode | Kode | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Jumlah ..... | |

Dengan Huruf : ( ..... )

1. Memerintahkan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan Pajak tersebut ke Bendahara Penerima (BP) ..... atau Bank Kalbar dengan Nomor Rekening ..... ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu 24 jam setelah Pemberitahuan Surat Paksa ini.

2. Memerintahkan kepada Juru Sita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Juru Sita lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melaksanakan Penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, apabila dalam waktu 2 x 24 jam Surat Paksa ini tidak dipeuhi.

**PERHATIAN**

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 2 X 24 JAM SETELAH MENERIMA SURAT PAKSA INI.
SESUDAH BATAS WAKTU, TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYITAAN
**(PASAL 31 PERWAKO SINGKAWANG NOMOR 10 TAHUN 2012)**

Singkawang, ....., ....
an. Walikota Singkawang

.....

.....

LAMPIRAN : XXVIII PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2012
TANGGAL 22 MARET 2012
TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
.....
.....
Jalan ..... Telp / Fax .....
.....

Kepada Yth.

Walikota .....
.....

di - .....

## LAPORAN PELAKSANAAN SURAT PAKSA

NOMOR : .....

I. Nama Wajib Pajak / Penanggung Pajak : .....
NPWPD : ☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐
Alamat : .....

II. Pelaksanaan
1. Penyerahan salinan Surat Paksa dilaksanakan tanggal .....
2. Berita Acara Pelaksanaan Surat Paksa terlampir
3. Hutang Pajak sebagai berikut :

MEDIA KETETAPAN YANG DIGUNAKAN

| NO | REKENING | | NOMOR KOHIR | TANGGAL JATUH TEMPO | JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR | JUMLAH PAJAK YANG TELAH DIBAYAR | | JUMLAH PAJAK YANG TELAH DIBAYAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | KODE | NAMA | | | | MENURUT SURAT PAKSA | MENURUT WAJIB PAJAK | MENURUT SURAT PAKSA | MENURUT WAJIB PAJAK |
| | | | | | | | | | |

III. Data Mengenai wajib Pajak/Penanggung Pajak
A. Pengajuan / Penyelesaian Surat Keberatan

| NO | REKENING | | NOMOR KOHIR | TANGGAL JATUH TEMPO | TANGGAL SURAT KEBERATAN | PENYELESAIAN SURAT KEBERATAN | | | TUNGGAKAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | KODE | NAMA | | | | TANGGAL | DITOLAK | DITERIMA | |
| | | | | | | | | | |

B. Objek Sita

| 1. Jenis Barang Bergerak | Terletak di : | Taksiran Harga | KESAN-KESAN DAN USUL JURU SITA |
|---|---|---|---|
| ..... | ..... | ..... | ..... |
| ..... | ..... | ..... | ..... |
| 2. Jenis Barang Tidak Bergerak | Terletak di : | Taksiran Harga | |
| ..... | ..... | ..... | |
| ..... | ..... | ..... | |

Mengetahui
.....

.....
.....
NIP. .....

Singkawang, .....
Juru Sita Pajak Daerah

.....
.....
NIP. .....

WALIKJOTA SINGKAWANG
ttd
HASAN KARMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

YASMALIZAR, SH
Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004

LAMPIRAN : XXIX PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2012
TANGGAL 22 MARET 2012
TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
.....
.....
Jalan ..... Telp / Fax .....
.....

# SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

NOMOR : .....

Nama Penanggung Pajak : .....
NPWPD : ☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐
Alamat : .....

Kepada siapa telah dilakukan penagihan dengan Surat Paksa Nomor : ..... Tanggal ..... Hingga saat ini belum melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayarkan, maka dengan ini diperintahkan kepada :

Nama : .....
NIP : .....
Jabatan : .....

Untuk melaksanakan Penyitaan barang-barang (bergerak atau tidak bergerak) milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, baik yang berada di tempat Wajib Pajak / Penanggung Pajak maupun yang berada di tangan orang lain.

Penyitaan agar dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang Saksi, Warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya.

Berita Acara Penyitaan agar disampaikan dalam waktu paling lambat ..... hari setelah Pelaksanaan Penyitaan.

Singkawang, ....., ....
an. Walikota Singkawang
.....

.....

**PERHATIAN**

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 14 (EMPAT BELAS) HARI SETELAH DILAKSANAKAN PENYITAAN SESUDAH BATAS WAKTU ITU KAMI AKAN MENGAJUKAN PERMINTAAN KEPADA BADAN URUSAN PIUTANG DAL LELANG NEGARA, AGAR BARANG-BARANG YANG TELAH DISITA DIJUAL DIMUKA UMUM
**(PASAL 31 PERWAKO SINGKAWANG NOMOR 10 TAHUN 2012)**

WALIKJOTA SINGKAWANG
ttd
**HASAN KARMAN**

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

YASMALIZAR, SH
Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004

LAMPIRAN : XXX PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2012
TANGGAL 22 MARET 2012
TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
.....
.....
Jalan ..... Telp / Fax .....
.....

# BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

**NOMOR : .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... atau kekuatan Surat Perintah melakukan Penyitaan ..... (Kepala Dinas Pendapatan .....) Nomor ..... Tanggal ..... Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota dalam hal memilih domisili di kantornya Jalan ..... berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan pada tanggal ..... Nomor ..... yang telah diberitahukan secara resmi kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang disebut di bawah ini, maka saya Juru Sita Daerah, bertempat tinggal di Jalan ..... dengan dibantu oleh 2 (dua) orang Saksi Warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau yang telah dewasa dan dapat dipercaya, antara lain yaitu :

1. ..... Pekerjaan .....
2. ..... Pekerjaan .....

telah datang di rumah / Perusahaan Wajib Pajak / Penanggung Pajak :

Nama : .....
NPWPD : ☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐
Alamat : .....

Untuk melaksanakan Perintah Penyitaan termaksud atas barang-barang milik Wajib Pajak / Penanggung Pajak, karena yang bersangkutan masih menunggak Pajak tersebut di bawah ini :

| JENIS PAJAK | JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR |
|---|---|
| ..... | ..... |
| ..... | ..... |

Surat Perintah Melakukan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :
- Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rincian barang-barang yang telah disita sebagai berikut :

| Jenis Barang Bergerak | Terletak di | Taksiran Harga |
|---|---|---|
| ..... | ..... | ..... |
| ..... | ..... | ..... |
| **Jenis Brg Tdk Bergerak** | **Terletak di** | **Taksiran Harga** |
| ..... | ..... | ..... |
| ..... | ..... | ..... |

Penyitaan tidak dapat dilaksanakan, karena :
.....
.....

| Wajib Pajak | Juru Sita | Saksi-saksi : |
|---|---|---|
| | | 1. ..... ( ..... ) |
| ..... | ..... | 2. ..... ( ..... ) |

WALIKJOTA SINGKAWANG
ttd
**HASAN KARMAN**

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

**YASMANZAR, SH**
Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004

**LAMPIRAN : XXXI** **PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG**
**NOMOR : 10 TAHUN 2012**
**TANGGAL : 22 MARET 2012**
**TENTANG : PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN.**

**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**
.....
.....
**Jalan ..... Telp/Fax.....**
.....

Singkawang, ....., .....

Nomor :
Perihal : Pencabutan Sita

Kepada Yth
Nama : .....
NPWPD : ☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐
Alamat : .....

Berhubung Saudara telah melunaskan tunggakan-tunggakan pajak, maka penyitaan atas barang milik Saudara yang telah dilakukan tanggal ..... dengan ini **DICABUT**

Demikian agar dimaklumi.

An. Walikota Singkawang
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kota Singkawang

.....
.....
NIP. .....

Tembusan
1. Kepala Bidang ( yang membidangi)
2. Juru Sita

WALIKOTA SINGKAWANG
ttd
**HASAN KARMAN**

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

**YASMALIZAR, SH**
Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004

LAMPIRAN : XXXII PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR : 10 TAHUN 2012
TANGGAL : 22 MARET 2012
TENTANG : PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
.....
.....
Jalan ..... Telp/Fax.....
.....

# SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN

**Nomor : .....**

Kepala ..... Dengan ini memerintahkan kepada :

Nama : .....
Jabatan : .....
NIP : .....

Untuk melaksanakan pemeriksaan atas :

Nama Wajib Pajak : .....
NPWPD : .....
Alamat : .....

1. **Objek Pemeriksaan :**
   .....
   .....
   .....

2. **Uraian Pekerjaan Pemeriksaan :**
   .....
   .....
   .....

Demikian Surat Pemerintah Pemeriksaan ini diberikan agar dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab dan kepada yang berkepentingan agar memaklumi serta dapat memberikan bantuan seperlunya.

Singkawang, ....., .....

An. Kepala .....
.....

.....
.....
NIP. .....

WALIKOTA SINGKAWANG
ttd
**HASAN KARMAN**

Salinan Sesuai dengan Aslinya
**Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan**

**YASMALIZAR, SH**
Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004

**LAMPIRAN : XXXIII PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG**
**NOMOR : 10 TAHUN 2012**
**TANGGAL : 22 MARET 2012**
**TENTANG : PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN.**

....., .....

Nomor : .....
Lampiran : .....
Perihal : **Permohonan Keberatan**

Kepada Yth.
Walikota .....
Cq. .....

di - .....

Dengan hormat.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama Pemilik / Pengelola : .....
Alamat : .....
.....

Bertindak untuk dan atas nama
Nama / Merk Badan Usaha : .....
NPWPD : ☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐
Alamat .....
.....

Bersama ini kami akan mengajukan Surat Permohonan Keberatan Pajak atas Ketetapan ..... dengan Nomor Kohir : ..... Bulan ..... Tahun ..... Sebesar Rp. .....

Adapun alasan kami :
.....
.....
.....
.....

Demikian agar kiranya Bapak dapat menyetujuinya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Tanda Terima

Nama :
NIP :
Jabatan :
Tanda Tangan :

Hormat Kami
Pemohon

(.....)

WALIKOTA SINGKAWANG
ttd
**HASAN KARMAN**

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

**YASMALIZAR, SH**
Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004

LAMPIRAN : XXXIV PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2012
TANGGAL 22 MARET 2012
TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

## BUKU REGISTER SURAT PERMOHONAN KEBERATAN

| No | Tanggal Terima | Surat Permohonan | | Ketetapan | | | | Nama | Alamat | NPWPD | Uraian Mengenai Keberatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tanggal | Nomor | Nama TAP Thn / Bln | Tanggal | Nomor | Jumlah | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

WALIKJOTA SINGKAWANG
ttd
HASAN KARMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

YASMALIZAR, SH
Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004

LAMPIRAN : XXXV PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR : 10 TAHUN 2012
TANGGAL : 22 MARET 2012
TENTANG : PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

# WALIKOTA SINGKAWANG

**SURAT KEPUTUSAN**
**WALIKOTA SINGKAWANG**
**NOMOR : .....**

**TENTANG**
**KEBERATAN PAJAK**

Membaca : Surat Permohonan Keberatan Nomor : .....
Tanggal : .....
Atas Nama : .....
Alamat : .....
NPWPD : ☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐

Menimbang : .....

Mengingat : .....

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

PERTAMA : Surat Ketetapan .....
Nomor Kohir : .....
Tahun / Bulan : .....
Nama / Merk Usaha : .....
NPWPD : ☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐

Nama Pemilik /
Pengelola : .....

Semula ditetapkan : Rp. .....
Dikurangi (ditambah) dengan sejumlah : Rp. .....
Besarnya ketetapan menjadi : Rp. .....

Dengan Huruf : .....

KEDUA : Memenuhi Pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang diterima.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Surat Keputusan Keberatan ini, maka akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di .....
Pada Tanggal .....

**WALIKOTA SINGKAWANG**

.....

WALIKOTA SINGKAWANG
ttd
**HASAN KARMAN**

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

**YASMALIZAR, SH**
Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004

LAMPIRAN : XXXVI PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR : 10 TAHUN 2012
TANGGAL : 22 MARET 2012
TENTANG : PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

# WALIKOTA SINGKAWANG

**SURAT KEPUTUSAN**
**WALIKOTA SINGKAWANG**
**NOMOR : .....**

**TENTANG**
**PENOLAKAN KEBERATAN**

Membaca : Surat Permohonan Keberatan Nomor : .....
Tanggal : .....
Atas Nama : .....
Alamat : .....
NPWPD : ☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐

Menimbang : .....
.....

Mengingat : .....
.....

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : .....
.....

PERTAMA : Menolak Surat Permohonan Keberatan Nomor : .....
Nomor Kohir : .....
Tanggal : .....
Atas Nama : .....
Alamat : .....
NPWPD : ☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐
Nama Pemilik : .....

Berhubung .....
.....

KEDUA : Memenuhi Pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang diterima.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Surat Keputusan Keberatan ini, maka akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di .....
Pada Tanggal .....

**WALIKOTA SINGKAWANG**

.....

WALIKOTA SINGKAWANG
ttd
**HASAN KARMAN**

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

**YASMALIZAR, SH**
Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004

LAMPIRAN : XXXVII PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2012
TANGGAL 22 MARET 2012
TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

# BUKU REGISTER SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN

| No | Tanggal Terima | SK. KEBERATAN | | Keberatan Atas SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN | | | | Jumlah Menurut SK Keberatan | Jumlah Restitusi | NPWPD, Nama, dan Alamat | Uraian Mengenai Keberatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tanggal | Nomor | Nama TAP Thn / Bln | Tanggal | Nomor | Jumlah | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

WALIKOTA SINGKAWANG
ttd
HASAN KARMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

YASMALIZAR, SH
Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004

LAMPIRAN : XXXVIII PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2012
TANGGAL 22 MARET 2012
TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
.....
.....
Jalan ..... Telp / Fax .....
.....

Kepada Yth.

.....
.....

Nomor : .....
Lampiran : .....
Perihal : **Laporan Hasil Pemeriksaan**

di - .....

Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : ..... Tanggal ..... Kami telah membukukan Pemeriksaan Lapangan terhadap :

| No | Nama, NPWPD, Alamat | Objek / Tujuan Pemeriksaan | Nomor Lampiran | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Adapun hasil pemeriksaan lapangn yang telah kami lakukan sebagaimana terlampir, apabila ada yang kurang jelas daapat menghubungi kami.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
.....

.....
.....
NIP. .....

Wajib Pajak

.....

Singkawang, .....
Petugas

.....
.....
NIP. .....

WALIKJOTA SINGKAWANG
ttd
**HASAN KARMAN**

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

**YASMALIZAR, SH**
Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004

**LAMPIRAN : XXXIX PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG**
**NOMOR : 10 TAHUN 2012**
**TANGGAL : 22 MARET 2012**
**TENTANG : PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN.**

.....,.....

Nomor : .....
Lampiran : .....
Perihal : **Permohonan Banding**

Kepada Yth.

Majelis Pertimbangan Pajak (MPP)

di - **Jakarta**

Dengan hormat.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik / Pengelola : .....
Alamat : .....
.....

Bertindak untuk dan atas nama
Nama Badan Usaha : .....
NPWPD : ☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐
Alamat .....
.....

Telah mengajukan Surat Permohonan Keringanan / Keberatan Pajak Nomor : ..... Tanggal ..... Atas Media Ketetapan ..... Bulan ..... Tahun ..... Nomor Kohir ..... Sebesar Rp. ..... Tentang .....

Selanjutnya mengajukan Surat Permohonan Banding ini dengan alasan :

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Demikianlah agar kiranya Bapak dapat menyetujuinya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih

Hormat Saya
Pemohon

(.....)

WALIKOTA SINGKAWANG
ttd
**HASAN KARMAN**

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

**YASMALIZAR, SH**
Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004

**LAMPIRAN : XL** **PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG**
**NOMOR : 10 TAHUN 2012**
**TANGGAL : 22 MARET 2012**
**TENTANG : PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN.**

**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**
.....
.....
**Jalan ..... Telp/Fax.....**
.....

....., .....

Nomor : .....
Lampiran : .....
Perihal : **Surat Pengantar Permohonan Banding WP atas Nama .....**

Kepada Yth.

Majelis Pertimbangan Pajak (MPP)

di - **Jakarta**

Memperhatikan Petikan Keputusan Walikota Singkawang Nomor ..... Tanggal ..... atas keberatan wajib pajak

Nama Pemilik / Pengelola : .....
Nama Badan Usaha : .....
NPWPD : ☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐
Alamat : .....
.....
Pekerjaan : .....

Tersebut dalam Pokok Surat, ternyata Wajib Pajak belum puas atas keputusan tersebut.
Sebagai pemenuhan haknya, Wajib Pajak yang bersangkutan telah mengajukan Permohonan Banding Tanggal ..... dan Surat Sanggahan kami sebagaimana terlampir yang telah memenuhi syarat formal untuk diteruskan kepada Bapak.

Demikianlah untuk menjadikan maklum dan mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

(.....)
.....
NIP. .....

WALIKOTA SINGKAWANG
ttd
**HASAN KARMAN**

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

**YASMALIZAR, SH**
Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004

**LAMPIRAN : XLI PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG**
**NOMOR : 10 TAHUN 2012**
**TANGGAL : 22 MARET 2012**
**TENTANG : PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN.**

....., .....

Perihal : Permohonan Pembetulan/
Pembatalan/Pengurangan/
Penghapusan Sanksi Adm.

Kepada Yth.
**Walikota Singkawang**
Cq. Kepala SKPD Kota Singkawang

di - **Singkawang**

Dengan hormat.

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama Pemilik : .....
Alamat : .....
.....

Bertindak untuk dan atas nama
Nama Badan Usaha : .....
NPWPD : ☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐
Alamat .....
.....

Kami mengajukan Surat Permohonan Pembetulan/Pembatalan/Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi atas SKPD/SKPDT/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDKLB/STPD*) Nomor ..... Bulan ..... Tahun ..... jumlah Rp. .....

Dengan alasan sebagai berikut :
.....
.....
.....
.....

Demikian agar kiranya Bapak dapat menyetujuinya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Saya
Pemohon

(.....)

*) *Coret yang tidak perlu*

WALIKOTA SINGKAWANG
ttd
**HASAN KARMAN**

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

**YASMALIZAR, SH**
Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004

LAMPIRAN : XLII PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2012
TANGGAL 22 MARET 2012
TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

# BUKU REGISTER SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN/PEMBATALAN/PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

| No | Tanggal Terima | Surat Permohonan | | Atas SKPD/SKPDT/SKPDKB/SKPDLB/SKPDN/STPD | | | | Nama | Alamat | NPWPD | Uraian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tanggal | Nomor | Nama TAP Thn / Bln | Tanggal | Nomor | Jumlah | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

WALIKOTA SINGKAWANG
ttd
HASAN KARMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

YASMALIZAR, SH
Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004

LAMPIRAN : XLIII PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2012
TANGGAL 22 MARET 2012
TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
.....
.....
Jalan ..... Telp / Fax .....
.....

# LAPORAN HASIL PENELITIAN

**Nomor : .....**

Berdasarkan Surat Tugas Penelitian/Pemeriksaan Wajib Pajak Nomor ..... Tanggal ..... telah melakukan Penelitian / Pemeriksaan terhadap .....

**I. WAJIB PAJAK**

1. Nama / Merk Usaha : .....
2. NPWPD : ☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐
3. Alamat : .....
4. Nama Pemilik/Pengelola : .....
5. Alamat : .....

**II OBJEK PAJAK**

1.
2.
3.
4.
5.

**III LAIN-LAIN**

1.
2.
3.

Konfirmasi Atas Kebenaran
Wajib Pajak

.....

Singkawang, .....
Kepala Bidang (yang membidangi)

.....
NIP. .....

WALIKJOTA SINGKAWANG
ttd
**HASAN KARMAN**

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

**YASMALIZAR, SH**
Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004

LAMPIRAN : XLIV PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR : 10 TAHUN 2012
TANGGAL : 22 MARET 2012
TENTANG : PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

# WALIKOTA SINGKAWANG

**SURAT KEPUTUSAN**
**WALIKOTA SINGKAWANG**
**NOMOR : .....**

**TENTANG**
**PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, KEBERATAN DAN PENGHAPUSAN**
**PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

Membaca : Surat Permohonan Nomor : .....
Tanggal : .....
Atas Nama : .....
Alamat : .....
NPWPD : ☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐

Menimbang : .....
.....

Mengingat : .....
.....

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : .....
.....

PERTAMA : Menerima Surat Permohonan Nomor : .....
Tanggal : .....
Atas Nama : .....
Alamat : .....
NPWPD : ☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐

Berhubung .....
.....

KEDUA : Memenuhi Pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah dibetulkan sebagaimana terlampir.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di .....
Pada Tanggal .....

**WALIKOTA SINGKAWANG**

.....

WALIKOTA SINGKAWANG
ttd
**HASAN KARMAN**

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

**YASMALIZAR, SH**
Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004

LAMPIRAN : XLVI PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2012
TANGGAL 22 MARET 2012
TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

## BUKU REGISTER SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

| No | Tanggal Terima | SK. Pembetulan | | Permohonan Atas SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN | | | | Jumlah Menurut SK Pembetulan | Jumlah Kelebihan Pembayaran | NPWPD, Nama, dan Alamat | Uraian Mengenai Pembetulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tanggal | Nomor | Nama TAP Thn / Bln | Tanggal | Nomor | Jumlah | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

WALIKOTA SINGKAWANG
ttd
HASAN KARMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

YASMALIZAR, SH
Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004

LAMPIRAN : XLVI PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR : 10 TAHUN 2012
TANGGAL : 22 MARET 2012
TENTANG : PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

# WALIKOTA SINGKAWANG

**SURAT KEPUTUSAN**
**WALIKOTA SINGKAWANG**
**NOMOR : .....**

**TENTANG**
**PENOLAKAN PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, KEBERATAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

Membaca : Surat Permohonan Nomor : .....
Tanggal : .....
Atas Nama : .....
Alamat : .....
NPWPD : ☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐

Menimbang : .....
.....

Mengingat : .....
.....

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : .....
.....

PERTAMA : Menolak Surat Permohonan Nomor : .....
Tanggal : .....
Atas Nama : .....
Alamat : .....
NPWPD : ☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐

Berhubung .....
.....

KEDUA : Memenuhi Pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah diterima.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di .....
Pada Tanggal .....

**WALIKOTA SINGKAWANG**

.....

WALIKOTA SINGKAWANG
ttd
**HASAN KARMAN**

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

**YASMALIZAR, SH**
Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004

LAMPIRAN : XLVII PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2012
TANGGAL 22 MARET 2012
TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

## BUKU REGISTER SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

| No | Tanggal Terima | SK. Penolakan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Sanksi Administratif | | Jumlah Menurut SK. Penolakan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Sanksi Administrasi | Nama, NPWPD, dan Alamat | Uraian Mengenai Penolakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tanggal | Nomor | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

WALIKOTA SINGKAWANG
ttd
HASAN KARMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

YASMALIZAR, SH
Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004

**LAMPIRAN : XLVIII PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG**
**NOMOR : 10 TAHUN 2012**
**TANGGAL : 22 MARET 2012**
**TENTANG : PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN.**

....., .....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : ***Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah***

Kepada Yth.
**Walikota Singkawang**
di - **Singkawang**

Dengan hormat.

Sesuai dengan Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding/Kelebihan Pembayaran atas SPTPD Nomor ..... tanggal ..... kami mohon dengan hormat kepada Walikota Singkawang untuk membayar kelebihan pembayaran :

Nama : .....

NPWPD : ☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐

Alamat : .....

Pekerjaan : .....

Kami mengajukan Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah sejumlah Rp. ..... (.....)

Dengan alasan :
1
2

demikian agar kiranya agar Bapak dapat menyetujuinya, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat Saya
Pemohon

(.....)

WALIKOTA SINGKAWANG
ttd
**HASAN KARMAN**

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

**YASMALIZAR, SH**
Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004

**LAMPIRAN : XLIX** **PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG**
**NOMOR : 10 TAHUN 2012**
**TANGGAL : 22 MARET 2012**
**TENTANG : PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN.**

| | |
|---|---|
| **PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**<br>.....<br>.....<br>**Jalan ..... Telp/Fax.....**<br>..... | **SPMKPD**<br>**(SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK DAERAH)**<br>**Tahun Anggaran** ..... **Bulan** .....<br>**Nomor** ..... |

Kepada Kepala ..... Diperintahkan untuk membayar SKPDLB dengan SPMU pengeluaran Wajib Pajak

Nama : .....
NPWPD : .....
NIP : .....

Berdasarkan Surat Ketetapan Daerah Lebih Bayar Nomor ..... Tanggal ..... ( terlampir ) sebagai berikut :

Kode Rekening Pajak : .....
Nama Pajak : .....
Jumlah : .....

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.

Singkawang, ....., .....

Walikota Singkawang

.....

WALIKOTA SINGKAWANG
ttd
**HASAN KARMAN**

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

**YASMALIZAR, SH**
Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004

LAMPIRAN : L

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR : 10 TAHUN 2012
TANGGAL : 22 MARET 2012
TENTANG : PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG<br>.....<br>.....<br>Jalan ..... Telp/Fax.....<br>..... | **BUKTI PEMINDAH BUKUAN** | No. urut :<br>Nama :<br>NPWPD :<br>Alamat : |

Berdasarkan Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah Nomor ..... Tanggal ..... Dan Hasil Pemeriksaan, maka Kelebihan Pembayaran Pajak Saudara/i diperhitungkan dengan hutang pajak yang lain adalah sebagai berikut :

| No | Kelebihan Pembayaran Pajak | | Jumlah Kelebihan Pembayaran Pajak | No | Diperhitungkan dengan Pajak Lain | | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kode Rekening | Uraian | | | Kode Rekening | Uraian | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Jumlah Kelebihan Pembayaran | | | | Jumlah yang Diperhitungkan | | | | |

Jumlah kelebihan pembayaran setelah diperhitungkan Rp .....
Dengan hurup ( ..... )

Singkawang, .....

.....
Wajib Pajak

Diserahkan oleh
Kepala Seksi ( yang membidangi)

.....
.....
NIP. .....

Disetujui oleh
Kepala Bidang ( yang membidangi)

.....
.....
NIP. .....

WALIKOTA SINGKAWANG
ttd
**HASAN KARMAN**

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

**YASMALIZAR, SH**
Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004

LAMPIRAN LI : PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR : 10 TAHUN 2012
TANGGAL : 22 MARET 2012
TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, PENERANGAN JALAN

A. PENDAFTARAN

## MEKANISME PENDAFTARAN

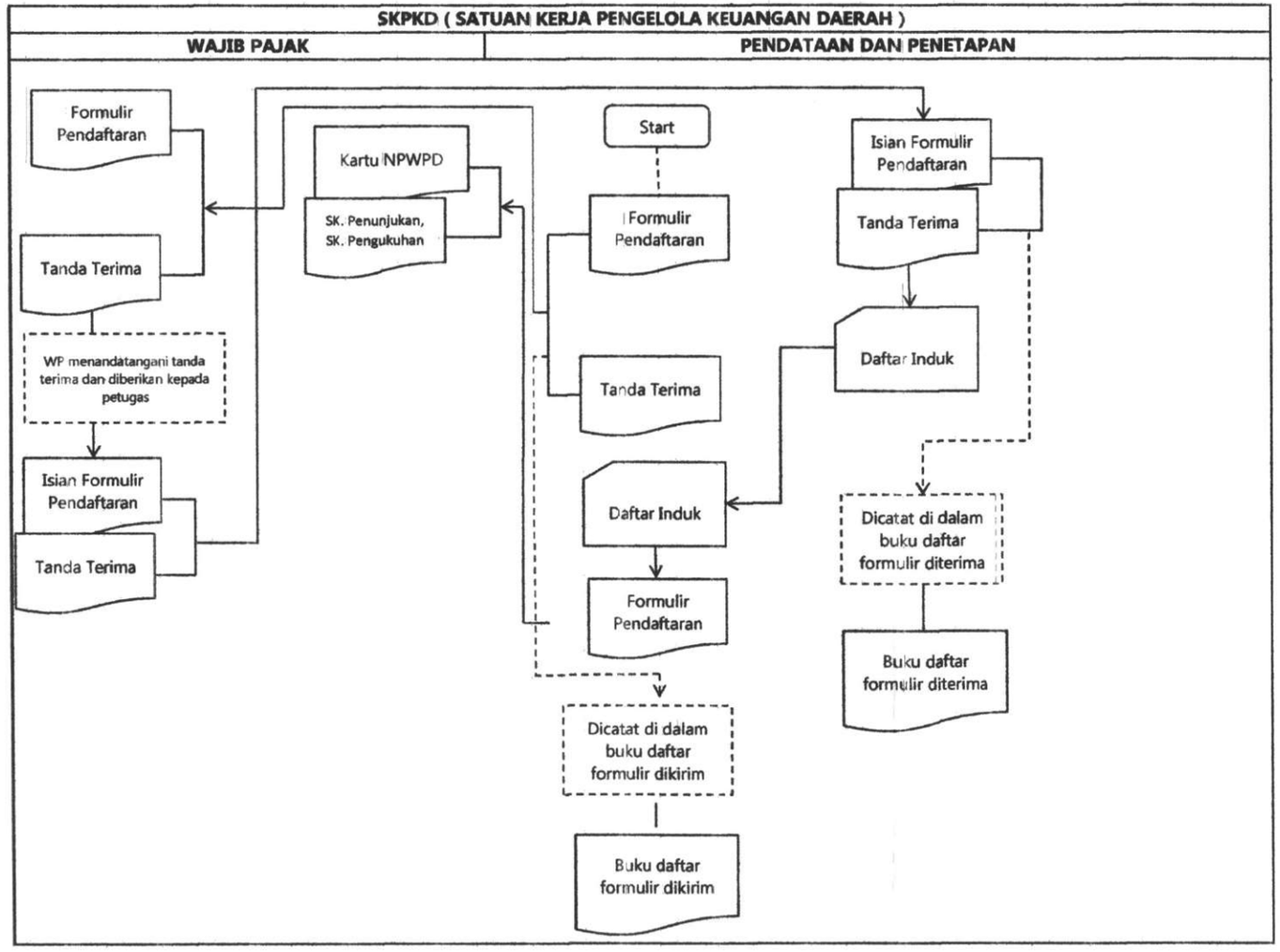

LAMPIRAN L : PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR : 10 TAHUN 2012
TANGGAL : 22 MARET 2012
TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, PENERANGAN JALAN

A. PENDAFTARAN

## MEKANISME PENDAFTARAN

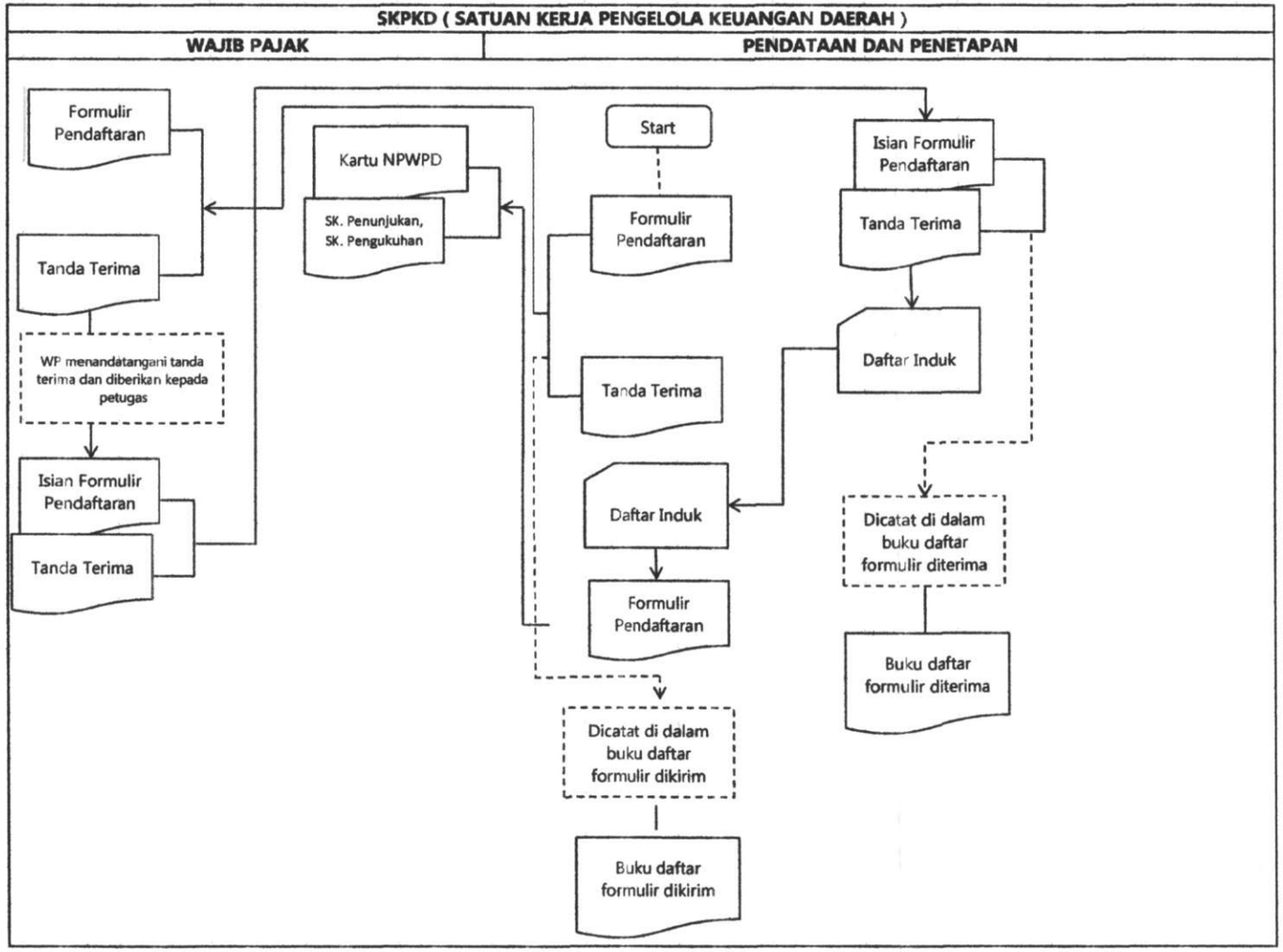

B. PENDATAAN

## MEKANISME PENDATAAN

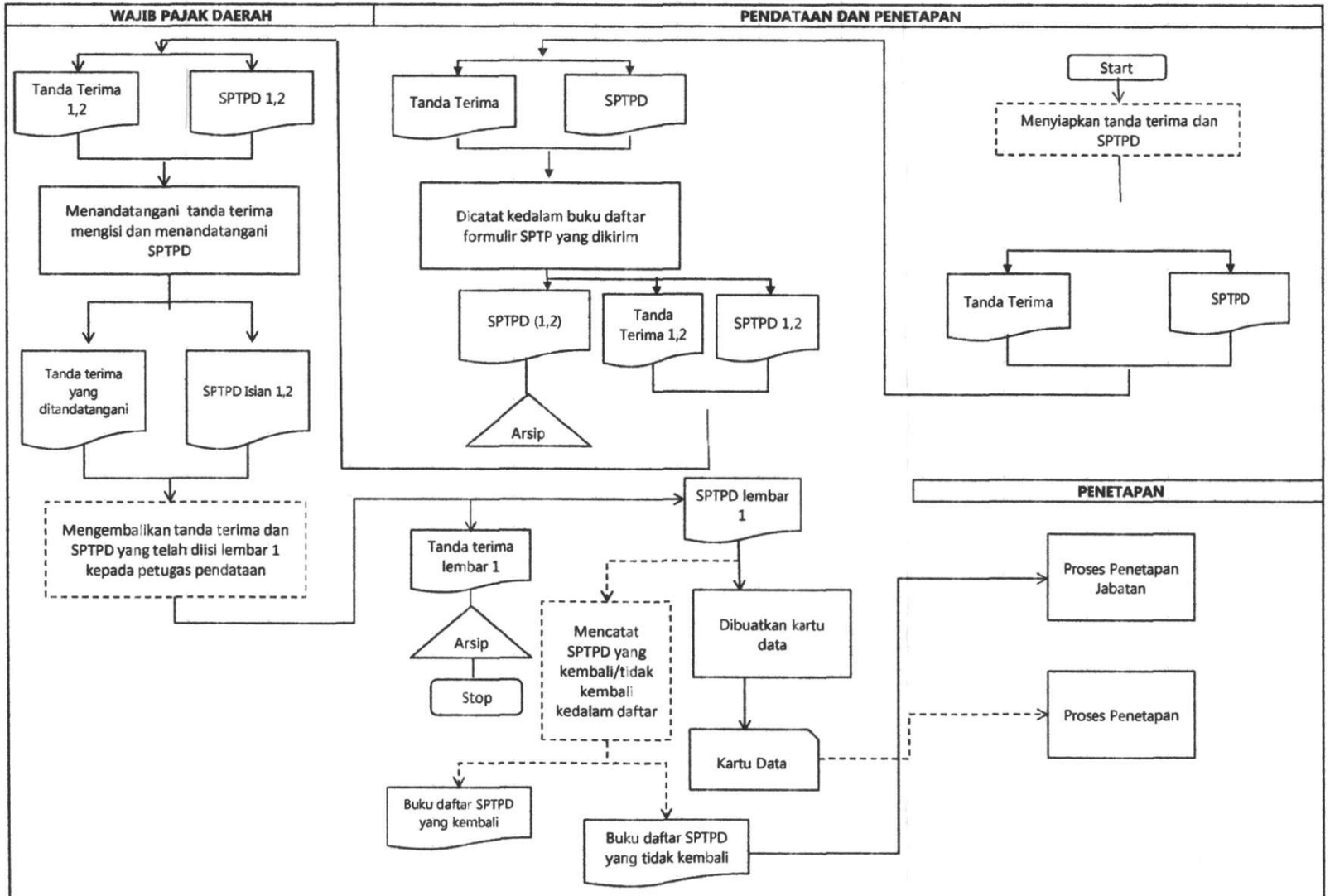


Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

YASMALIZAR, SH
Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004

**WALIKOTA SINGKAWANG**
**ttd**
**HASAN KARMAN**

**LAMPIRAN : LII**

**PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG**
**NOMOR : 10 TAHUN 2012**
**TANGGAL : 22 MARET 2012**
**TENTANG : PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**<br>.....<br>.....<br>Jalan ..... Telp / Fax .....<br>..... | **SKPD-KB**<br>**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR**<br>**MASA :**<br>**TAHUN :** | **NOMOR KOHIR** |

**NAMA BADAN USAHA :**
**ALAMAT :**
**NPWPD :**

I Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 telah dilakukan Pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

Kode Rekening : .....
Nama Rekening : .....

II Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Dasar Pengenaan | | | Rp. ..... |
| 2. Pajak yang terhutang | | | Rp. ..... |
| 3. Kredit Pajak | | | |
| a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya | Rp. ..... | | |
| b. Setoran yang sudah dilaksanakan | Rp. ..... | | |
| c. Lain-lain | Rp. ..... | | |
| d. Jumlah yang dapat dikreditkan ( a+b+c) | | Rp. ..... | |
| 4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak ( 2 - 3d ) | | | Rp. ..... |
| 5. Sanksi Administrasi : | | | |
| a. Bunga (Pasal 9 Ayat 1) | Rp. ..... | | |
| b. Kenaikan (Pasal 9 Ayat 5) | Rp. ..... | | |
| c. Jumlah sanksi administrasi ( a+b) | | Rp. ..... | |
| 6. Jumlah yang masih harus dibayar ( 4 + 5c ) | | | Rp. ..... |

Dengan Hurup [ ]

**PERHATIAN :**

1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendarawan Penerima atau Kas Umum Daerah (Bank Kalbar) dengan menggunakan Tanda Bukti Setoran (STS)
2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang bayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan ;

Singkawang, .....
An. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kepala Bidang (yang membidangi)

NIP. .....

gunting disini

NO. Kohir .....

**TANDA TERIMA**

NPWPD : .....
NAMA : .....
ALAMAT : .....
JUMLAH YANG DIBAYAR : Rp. .....

Singkawang. .....
Yang Menerima

(.....)

WALIKOTA SINGKAWANG
ttd
**HASAN KARMAN**

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

**YASMALIZAR, SH**
Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004

**LAMPIRAN : LIII** **PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG**
**NOMOR : 10 TAHUN 2012**
**TANGGAL : 22 MARET 2012**
**TENTANG : PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**<br>**DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET**<br>**Jalan Gunung Kerinci Telp / Fax 0562 639623**<br>**SINGKAWANG 7923** | **SKPD-KBT**<br>**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN**<br>**MASA :**<br>**TAHUN :** | **NOMOR KOHIR** |

**NAMA BADAN USAHA :**
**ALAMAT :**
**NPWPD :**

I Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 telah dilakukan Pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

Kode Rekening : .....
Nama Rekening : .....

II Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Dasar Pengenaan | | | Rp. ..... |
| 2. Pajak yang terhutang | | | Rp. ..... |
| 3. Kredit Pajak | | | |
| a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya | Rp. ..... | | |
| b. Setoran yang sudah dilaksanakan | Rp. ..... | | |
| c. Lain-lain | Rp. ..... | | |
| d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c) | | | Rp. ..... |
| 4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak ( 2 - 3d ) | | | Rp. ..... |
| 5. Sanksi Administrasi : | | | |
| a. Bunga (Pasal 9 Ayat 1) | Rp. ..... | | |
| b. Kenaikan (Pasal 9 Ayat 5) | Rp. ..... | | |
| c. Jumlah sanksi administrasi ( a+b) | | | Rp. ..... |
| 6. Jumlah yang masih harus dibayar ( 4 + 5c ) | | | Rp. ..... |

Dengan Hurup [ ]

**PERHATIAN :**
1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendarawan Penerima atau Kas Umum Daerah (Bank Kalbar) dengan menggunakan Tanda Bukti Setoran (STS)
2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang bayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan ;

Singkawang, .....
An. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kepala Bidang (yang membidangi)

.....
NIP. .....

gunting disini

NO. Kohir .....

**TANDA TERIMA**

NPWPD : .....
NAMA : .....
ALAMAT : .....
JUMLAH YANG DIBAYAR : Rp. .....

Singkawang. .....
Yang Menerima

(.....)

WALIKOTA SINGKAWANG
ttd
**HASAN KARMAN**

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

**YASMALIZAR, SH**
Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004

**LAMPIRAN : LIV** **PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG**
**NOMOR : 10 TAHUN 2012**
**TANGGAL : 22 MARET 2012**
**TENTANG : PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**<br>.....<br>.....<br>Jalan ..... Telp / Fax .....<br>..... | **SKPD-N**<br>**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH**<br>**NIHIL**<br><br>**MASA :**<br>**TAHUN :** | **NOMOR KOHIR** |

NAMA BADAN USAHA :
ALAMAT :
NPWPD :

I Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 telah dilakukan Pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

Kode Rekening : .....
Nama Rekening : .....

II Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Dasar Pengenaan | | | Rp. ..... |
| 2. Pajak yang terhutang | | | Rp. ..... |
| 3. Kredit Pajak | | | |
| a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya | Rp. ..... | | |
| b. Setoran yang sudah dilaksanakan | Rp. ..... | | |
| c. Lain-lain | Rp. ..... | | |
| d. STP (Pokok) | Rp. ..... | | |
| e. Jumlah yang dapat dikreditkan ( a+b+c+d+) | | | Rp. ..... |
| 4. Jumlah yang masih harus dibayar ( 2 - 3e ) | | | Rp. (NIHIL) |

Singkawang, .....
An. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kepala Bidang (yang membidangi)

.....
NIP. .....

gunting disini

NO. Kohir .....

**TANDA TERIMA**

NPWPD : .....
NAMA : .....
ALAMAT : .....
JUMLAH YANG DIBAYAR : Rp. .....

Singkawang. .....
Yang Menerima

(.....)

WALIKOTA SINGKAWANG
ttd
**HASAN KARMAN**

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

**YASMALIZAR, SH**
Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004